

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Struktur Organisasi.....	3
1.3. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama.....	6
1.4. Landasan Hukum	7
1.5. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1. Rencana Strategis.....	14
2.1.1. Visi Kepala Daerah.....	14
2.1.2. Misi Kepala Daerah.....	15
2.1.3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	15
2.2. Rencana Kerja Tahun 2022.....	19
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022.....	24
3.2. Realisasi Anggaran	62
3.3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	64
BAB IV PENUTUP	71



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan.....	17
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah	20
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah	21
Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja Utama	25
Tabel 5 Perbandingan Capaian Kinerja.....	27
Tabel 6 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Dibandingkan dengan RPJMD	28
Tabel 7 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain	29
Tabel 8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan dan Solusi	30
Tabel 9 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	55
Tabel 10 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	62
Tabel 11 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	64
Tabel 12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	65

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LKj SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tebing Tinggi, Februari 2023

INSPEKTUR KOTA TEBING TINGGI



H. KAMLAN, SH, MM, CGCAE

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19650603 198602 1 004



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan kepada Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Suplemen Renstra 2021 - 2022.

Implementasi akuntabilitas kinerja diwujudkan oleh Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi dan penganggaran serta pengukuran kinerja secara menyeluruh dimulai dengan penyusunan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja serta kontrak kinerja eselon III dan eselon IV.

1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi. Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan masing-masing Asisten membawahi dan mengordinasikan 3 (tiga) Bagian serta masing-masing Bagian terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari :

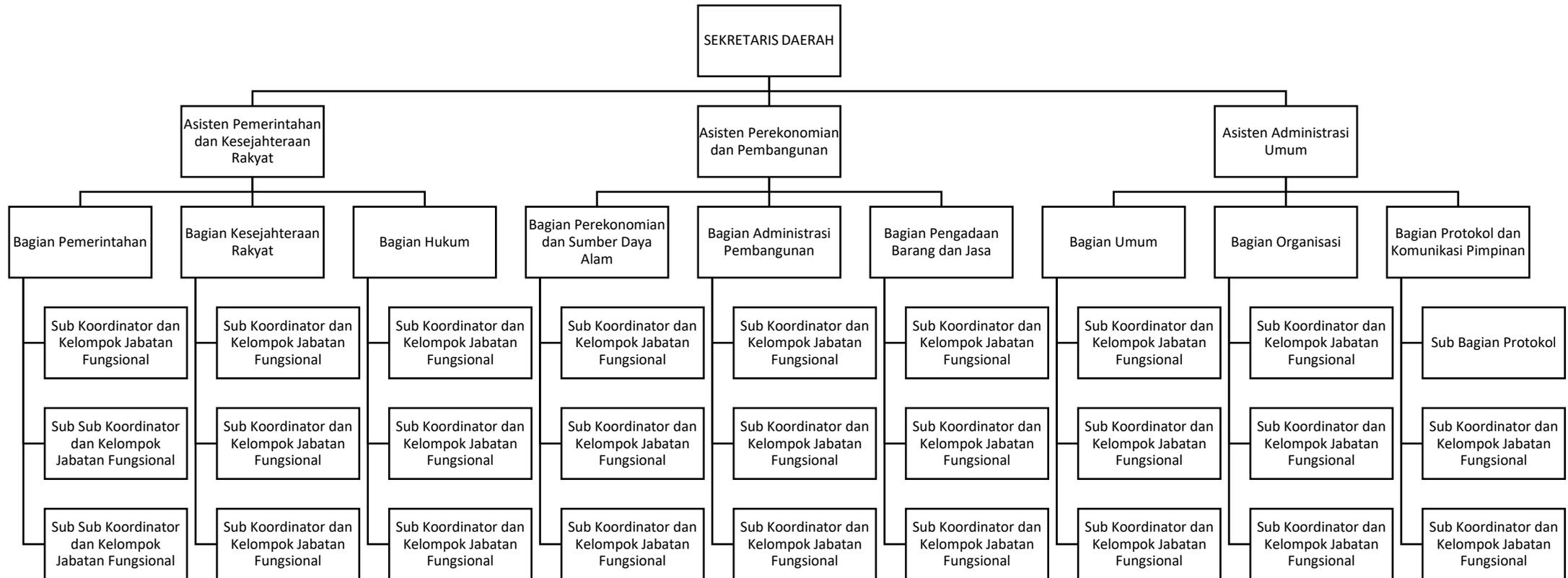
A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi dan mengkoordinasikan :

1. **Bagian Pemerintahan**, terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) Sub Koordinator;
2. **Bagian Kesejahteraan Rakyat**, terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) Sub Koordinator;



3. **Bagian Hukum**, terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) Sub Koordinator;
- B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan**, yang membawahi dan mengkoordinasikan:
 1. **Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam**, terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) Sub Koordinator;
 2. **Bagian Administrasi Pembangunan**, terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) Sub Koordinator;
 3. **Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**, terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) Sub Koordinator;
- C. Asisten Administrasi Umum, Membawahi dan Mengordinasikan;**
 1. **Bagian Umum**, terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) Sub Koordinator;
 2. **Bagian Organisasi**, terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) Sub Koordinator;
 3. **Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**, terdiri dari:
 - a. Sub bagian Protokol;
 - b. 3 (tiga) Sub Koordinator.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi



1.3. Fungsi dan Tugas

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, Sekretariat Daerah Kota menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi, menetapkan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

1. Pengordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pengordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan Daerah;
4. Pelayanan administrative dan pembinaan aparatur sipil Negara pada instansi Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemu kenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.

Peran Sekretariat Daerah pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi adalah untuk membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan OPD-OPD lainnya, dimana OPD merupakan ujung tombak pelaksanaan program Pemerintah Kota dan Sekretariat Daerah menopang dalam hal pengadministrasian.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dijalankan secara optimal, Sekretariat Daerah menghadapi tantangan sebagai berikut :

1. Kualitas sistem pelayanan publik masih perlu dilakukan peningkatan;
2. Penyelenggaraan pengoordinasian tugas dan kinerja SKPD yang masih belum efektif;
3. Percepatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan yang masih perlu ditingkatkan.

Sumber daya adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan strategis yang diperlukan untuk mencapai tujuan dalam satu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah Kota.



Sebagai gambaran sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1.5. Keadaan Pegawai

Sumber daya adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan strategis yang diperlukan untuk mencapai tujuan dalam satu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah Kota.

Sebagai gambaran sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel. 1 Pegawai Negeri Sipil / ASN di Lingkungan
Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah	1	-	1
2	Staf Ahli	1	-	1
3	Asisten	2	-	2
4	Bagian Pemerintahan	5	6	11
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	3	2	5
6	Bagian Hukum	3	6	9
7	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	5	5	10
8	Bagian Administrasi Pembangunan	3	4	7
9	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	11	6	17
10	Bagian Umum	17	6	23
11	Bagian Organisasi	2	8	10
12	Bagian Protokol	2	6	8
Jumlah Keseluruhan		55	44	99



Tabel. 2 Pegawai Negeri Sipil / ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Instansi/Bagian	Jenis Pendidikan									
		SD	SMP	SMA	D-I	D-II	D-III	D-IV	S-1	S-2	S-3
1	Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Staf Ahli	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	Asisten	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
4	Bagian Pemeintahan	-	1	2	-	-	1	-	4	3	-
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-
6	Bagian Hukum	-	-	2	-	-	-	-	5	2	-
7	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-	-	8	2	-
8	Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	1	-	-	-	-	5	1	-
9	Bagiaian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	1	-	-	1	-	15	-	-
10	Bagian Umum	-	1	9	-	-	1	-	12	-	-
11	Bagian Organisasi	-	-	-	-	-	-	-	8	2	-
12	Bagian Protokol	-	-	3	-	-	-	-	5	-	-
Jumlah Keseluruhan		0	2	18	0	0	3	0	67	14	0



Tabel. 3 Pegawai Negeri Sipil / ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Berdasarkan Kepangkatan

No	Instansi/Bagian	Golongan / Pangkat																	Jumlah	
		I.a	I.b	I.c	I.d	II.a	II.b	II.c	II.d	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b	IV.c	IV.d	IV.e		
1	Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Staf Ahli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3
3	Asisten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	
4	Bagian Pemerintahan	-	-	-	-	1	-	-	1	5	1	2	-	1	-	-	-	-	11	
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	5	
6	Bagian Hukum	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	2	-	1	-	-	-	9	
7	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	1	1	1	-	-	-	10	
8	Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	1	1	-	-	-	-	7	
9	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	2	7	2	3	3	-	-	-	-	-	17	
10	Bagian Umum	-	-	-	1	2	-	3	4	5	3	2	1	1	1	-	-	-	23	
11	Bagian Organisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	2	-	1	-	-	-	10	
12	Bagian Protokol	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	2	1	-	-	-	-	8	

1.6. Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi memiliki dukungan sarana prasarana perkantoran dan operasional sebagai berikut :

Tabel. 4 Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi

No	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (UNIT)
1	2	3
1	Ruang Kerja Kepala Bagian	9
2	Ruang Kerja Staf	9
3	Kamar Mandi	9
4	Laptop	60
5	Printer/Scanner	45
6	AC Standing	0
7	AC Split	32
8	Lemari Arsip	42
9	Filling Cabinet	32
10	Meja Kerja Pimpinan	30
11	Meja Kerja Staf	84
12	Kursi Kerja Pimpinan	32
13	Kursi Kerja Staf	109
14	Kursi Kerja besi/metal	4
15	Kursi Tamu/ Sofa	8
16	Jam Dinding	11
17	Tong Sampah/Alat Kebersihan	11
18	Jaringan Internet	3
19	Tablet Android	2
20	Sound System	1
21	Komputer PC	12
22	Televisi	5
23	Lemari Kayu	2
24	Lemari Besi	4
25	Lemari Display	2
26	Dispenser	4

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



27	Struktur Organisasi	2
28	Mini Bus	3
29	Alat penghancur kertas	7
30	LCD Projector/Infocus	5
31	Papan Pengumuman	5
32	Meja 1/2 biro	4
33	Meja Rapat	1
34	Kursi Rapat	14
35	Kursi Putar	7
36	Microphone/Wireless	1
37	Camera DSLR	4
38	Camera Poket	2
39	Telephone	1
40	Harddisk External	1
41	Sepeda Motor	7
42	Drone	1

1.7. Landasan Hukum

1. PermenPAN dan RB No. 53 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi No. 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan No. 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi.
4. Peraturan Walikota Tebing Tinggi No. 1 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas, Fungsi, Tata kerja dan Rincian Tugas Jabatan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.
5. Peraturan Walikota Tebing Tinggi No. 40 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 Kota Tebing Tinggi.



1.8. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Adapun Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang penjelasan umum OPD, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan bagian serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi bagian. Selain itu juga berisi tentang landasan hukum dan sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahun kepada yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja OPD dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya :

1. Capaian Kinerja OPD

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja OPD untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis bagian sesuai dengan hasil pengukuran kinerja bagian.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun akhir;
3. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja;

2. Realisasi Anggaran

Pada bagian ini berisi realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja bagian sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja OPD serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan bagian untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN



Berisi Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu.

Selain dari sistematika penyusunan LKjIP hal lain yang perlu diperhatikan adalah terkait upaya-upaya dalam penyusunan LKjIP, antara lain :

1. Pelaporan dan evaluasi harus berfokus pada perencanaan yang telah disusun.
2. Penguraian faktor keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target yang telah ditentukan.
3. Berfokus pada hasil dan rencana aksi yang telah disusun.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis.

Tahun 2022, Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi menggunakan dasara pelaksanaan kegiatan dengan acuan Suplemen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022-2023. Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi merupakan manifestasi komitmen Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang tertuang dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2023. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Suplemen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022-2023 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2013-2018).

RPJMD Pemerintah Kota Tebing Tinggi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi No. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

2.1.1. Visi Kepala Daerah.

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017, Organisasi Perangkat Daerah tidak harus memiliki Visi sendiri, maka dipakailah visi Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022, yaitu:



Visinya adalah:

“ MENJADIKAN KOTA TEBING TINGGI MENJADI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN YANG BERIMAN, CERDAS, LAYAK, MANDIRI DAN SEJAHTERA DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERKUALITAS “.

2.1.2. Misi Kepala Daerah.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan dan diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Untuk melaksanakan visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
2. Mewujudkan Tebing Tinggi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan Perdagangan;
3. Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa;
4. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

Penentuan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan permasalahan pembangunan, Visi, Misi dan Program Walikota/Wakil Walikota terpilih. Penetapan tujuan perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing yang tinggi untuk mencapai tujuan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Sekretariat Daerah selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun mendatang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi 2018-2023. Adapun tujuan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Demi tercapainya tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik/good governance tersebut, Sekretariat Daerah menganut prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan, pelayanan, responsif,



transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijaksanaan dan kepastian hukum. Paling tidak syarat agar terciptanya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dewasa ini yang meliputi transparansi, responsive, efektif, dan efisiensi serta akuntabilitas. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik pada umumnya dalam upaya mewujudkan paradigma *good governance* yang merupakan sebagai bingkai kerja dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Sasaran adalah pembelajaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintahan dalam jangka waktu tahunan, semester dan triwulan serta harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sehingga bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur serta dicapai Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi yaitu;

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi;
3. Meningkatkan Pelayanan Kedinasan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pengoordinasian tugas dan kinerja OPD;
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan;
6. Meningkatkan perkembangan kelurahan;
7. Terpenuhi atas pembentukan hukum yang baik;
8. Meningkatkan Kinerja PDAM Tirta Bulian.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



Tabel 1 Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Formulasi	Target Kinerja		Bagian Penanggungjawab
						2021	2022	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Merupakan Nilai Yang Diperoleh Dari Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat Yang Dilakukan Secara Elektronik Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat (Sikemas)	86,5 (Indeks)	86,75 (Indeks)	Bagian Organisasi
				1.2	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah (AKIP)	Nilai Akip Diperoleh Berdasarkan Hasil Evaluasi Yang Dilakukan Oleh Inspektorat	80 (Angka)
		Temuan hasil pengawasan yang diselesaikan	(Jumlah Temuan Hasil Pengawasan Yang Diselesaikan / Jumlah Temuan Yang Ada) X 100%			100 (Persen)	100 (Persen)	Bagian Umum
		1.3	Meningkatnya pelayanan kedinasan Walikota dan Wakil Walikota	Persentase tugas-tugas kedinasan Walikota dan Wakil Walikota diselesaikan tepat waktu	(Jumlah Tugas-Tugas Kedinasan Wali Kota Dan Wakil Walikota Diselesaikan Tepat Waktu / Jumlah Kedinasan Wali Kota Dan Wakil Walikota Yang Dilaksanakan) X 100%	100 (Persen)	100 (Persen)	Bagian Umum dan Bagian Protokol dan Humas Pimpinan
		1.4	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pengoordinasian tugas dan kinerja skpd	Jumlah paket pengadaan barang/jasa pada SKPD yang dilakukan melalui proses tender disampaikan kepada Bafian Pengadaan Barang dan Jasa 4 Bulan setelah APBD disahkan	(Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilakukan Melalui Proses Tender Disampaikan Kepada Bagian Pengadaan Setelah APBD Disahkan / Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Harus Ditenderkan) X 100%	20 (Persen)	25 (Persen)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
				Jumlah SKPD yang realisasi keuangannya >= 40% pada semester i	(Jumlah Skpd Dengan Realisasi Keuangan >=40% Pada Semester I / Jumlah Skpd) X 100%	25 (Persen)	25 (Persen)	Bagian Administrasi Pembangunan
				Jumlah SKPD yang realisasi fisik kegiatannya >=50% pada semester i	(Jumlah Skpd Dengan Realisasi Fisik Kegiatan >=50% Pada Semester I / Jumlah Skpd) X 100%	25 (Persen)	25 (Persen)	Bagian Administrasi Pembangunan
				Jumlah SKPD yang nilai ikm-nya kategori sangat baik berdasarkan pengukuran survey kepuasan masyarakat yang dilakukan	(Jumlah Skpd Yang Nilai Ikm-Nya Kategori Sangat Baik / Jumlah Skpd) X 100%	28,57 (Persen)	30,61 (Persen)	Bagian Organisasi

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



		1.5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kecamatan dengan kategori baik	(Jumlah Kecamatan Dengan Kategori Baik / Jumlah Kecamatan) X 100%	20 (Persen)	20 (Persen)	Bagian Pemerintahan
				Jumlah Kelurahan dengan kategori baik	(Jumlah Kelurahan Dengan Kategori Baik / Jumlah Kelurahan) X 100%	20 (Persen)	20 (Persen)	Bagian Pemerintahan
		1.6	Meningkatnya perkembangan Kelurahan	Jumlah Kelurahan dengan kategori cepat berkembang	(Jumlah Kelurahan Kategori Cepat Berkembang / Jumlah Kelurahan) X 100%	71,43% (Persen)	71,43% (Persen)	Bagian Pemerintahan
		1.7	Terpenuhi asas pembentukan hukum yang baik	Persentase rancangan produk hukum daerah yang memenuhi asas pembentukan hukum yang baik	(Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Memenuhi Asas Pembentukan Hukum Yang Baik / Jumlah Rancangan Produk Hukum) X 100%	100 (Persen)	100 (Persen)	Bagian Hukum
		1.8	Meningkatnya kinerja PDAM tirta bulian	Tingkat kesehatan PDAM Tirta Bulian	Tingkat Kesehatan Pdam Tirta Bulian Merupakan Nilai Yang Diperoleh Berdasarkan Hasil Evaluasi Yang Meliputi Penilaian Kinerja, Penilaian Tingkat Kesehatan, Dan Penilaian Pelayanan	3.14 (Angka)	2,86 (Angka)	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam



2.2. Rencana Kerja Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 33.799.025.796,00 dengan rincian Belanja Pegawai Rp. 11.692.304.000,00, Belanja Barang dan Jasa Rp. 19.902.269.400,00, Belanja Hibah Rp. 1.430.900.000,00, Belanja Bantuan Sosial Rp. 541.584.000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 144.207.596,00, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 87.760.800,00. Melalui mekanisme perubahan APBD 2022 menjadi Rp. 35.334.288.565,00 dengan rincian Belanja Pegawai Rp. 12.236.511.344,00, Belanja Barang dan Jasa Rp. 20.308.010.325,00, Belanja Hibah Rp. 1.955.955.000,00, Belanja Bantuan Sosial Rp. 554.664.000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 182.286.096,00, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 96.861.800,00.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja OPD;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja OPD.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 adalah sebagai berikut

:

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik			
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	86,75
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah (AKIP)	Angka	82
		Temuan hasil pengawasan yang diselesaikan	Persen	100
3.	Meningkatnya pelayanan kedinasan Walikota dan Wakil Walikota	Persentase tugas-tugas kedinasan Walikota dan Wakil Walikota diselesaikan tepat waktu	Persen	100
4.	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pengoordinasian tugas dan kinerja SKPD	Jumlah paket pengadaan barang/jasa pada SKPD yang dilakukan melalui proses tender disampaikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 4 bulan setelah APBD disahkan	Persen	25
		Jumlah SKPD yang realisasi keuangannya >= 40% pada semester i	Persen	25
		Jumlah SKPD yang realisasi fisik kegiatannya >=50% pada semester i	Persen	25
		Jumlah SKPD yang nilai ikm-nya kategori sangat baik berdasarkan pengukuran survey kepuasan masyarakat yang dilakukan	Persen	30,61
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kecamatan dengan kategori baik	Persen	20
		Jumlah Kelurahan dengan kategori baik	Persen	20
6.	Meningkatnya perkembangan Kelurahan	Jumlah Kelurahan dengan kategori cepat berkembang	Persen	71,43
7.	Terpenuhi asas pembentukan hukum yang baik	Persentase rancangan produk hukum daerah yang memenuhi asas pembentukan hukum yang baik	Persen	100
8.	Meningkatnya kinerja PDAM tirta bulian	Tingkat kesehatan PDAM Tirta Bulian	Angka	2,86

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



Tabel 3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Temuan hasil pengawasan yang diselesaikan	100 Persen	
		Persentase tugas-tugas kedinasan walikota dan wakil walikota diselesaikan tepat waktu	95 Persen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd	100 Persen	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	107 Orang	Rp11.995.761.344,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	12 Laporan	Rp12.458.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlindunginya barang milik daerah	100 Persen	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah skpd	8 Dokumen	Rp368.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sandang pegawai	100 Angka	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	Rp99.970.500,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd	100 Persen	
		Persentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd	100 Persen	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	Rp33.894.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	Rp70.060.900,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	Rp54.775.900,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	Rp33.549.800,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	Rp2.076.644.900,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	200 Laporan	Rp1.844.296.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd	100 Persen	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	100 Unit	Rp193.428.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd	100 Persen	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	Rp1.145.702.200,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	Rp1.832.664.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik sekretariat daerah	100 Persen	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	30 Unit	Rp1.097.560.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	200 Unit	Rp301.184.800,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	7 Unit	Rp105.652.000,00
	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan rumah tangga kdh/ wkdh	100 Persen	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	12 Paket	Rp480.000.000,00
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	12 Paket	Rp180.000.000,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Predikat indeks kepuasan masyarakat (ikm)	Predikat Baik	
		Tingkat kepatuhan terhadap pelayanan publik	Nilai Zona Hijau	
		Tingkat akuntabilitas kinerja	Nilai BB	
		Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan percepatan reformasi birokrasi	100 Persen	
		Persentase perangkat daerah yang telah melakukan analisis jabatan dan analisa beban kerja	100 Persen	
		Tingkat kematangan perangkat daerah	Predikat Tinggi	
	Penataan Organisasi	Persentase penataan organisasi di bidang pelayanan publik dan tata laksana yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di seluruh skpd	100 Persen	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022



No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		Persentase penataan organisasi di bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di seluruh skpd	100 Persen	
		Persentase penataan organisasi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di seluruh skpd	100 Persen	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase skpd yang telah terkelola dengan baik di bidang kelembagaan dan analisis jabatannya	100 Persen	Rp54.820.000,00
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase skpd yang telah mendapatkan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana dari bagian organisasi	100 Persen	Rp37.101.500,00
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase skpd yang kinerjanya telah terevaluasi dan telah melaksanakan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi	100 Persen	Rp491.840.800,00
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase skpd yang telah di monitoring dan di evaluasi kualitas pelayanan publik dan tata laksananya	100 Persen	Rp52.420.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase skpd yang telah menyusun laporan kinerja sesuai dengan sistematika yang dikoordinasikan oleh bagian organisasi	100 Persen	Rp6.060.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan kedinasan wali kota dan wakil wali kota yang terlaksana	100 Persen	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelayanan keprotokol dan komunikasi pimpinan yang terlaksana	100 Persen	
	Fasilitasi Keprotokol	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokol	100 Laporan	Rp282.212.000,00
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	75 Laporan	Rp124.671.300,00
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	100 Laporan	Rp226.119.400,00
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah kecamatan dengan kategori baik	20 Persen	
		Jumlah kelurahan dengan kategori baik	20 Persen	
		Jumlah kelurahan dengan kategori cepat berkembang	71,43 Persen	
		Jumlah kecamatan dan kelurahan dengan kategori baik	100 Persen	
	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan	16 Dokumen	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	75 Dokumen	
		Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	50 Dokumen	
		Jumlah kegiatan pengelolaan administrasi kewilayahan	100 Persen	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah rapat kunjungan pemerintahan daerah	10 Angka	Rp242.401.700,00
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah kelurahan dengan kategori baik	20 Persen	Rp399.076.300,00
		Jumlah kecamatan dengan kategori baik	20 Persen	
		Jumlah kelurahan dengan kategori cepat berkembang	71,43 Persen	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Skpd yang memenuhi ketersediaan data dan dokumen pendukung dalam rangka ekppd	100 Persen	Rp136.844.200,00
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri	50 Dokumen	
		Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama	50 Laporan	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen kerjasama dalam negeri yang di tindaklanjuti	10 Dokumen	Rp228.413.600,00
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama	1 Laporan	Rp9.831.100,00
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat	100 Persen	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terlaksana	100 Persen	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase peningkatan kesejahteraan rakyat	100 Persen	Rp7.527.726.800,00
		Persentase peningkatan bina mental spiritual	100 Persen	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan kesejahteraan sosial	100 Persen	Rp144.299.200,00
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase peningkatan kesejahteraan rakyat	100 Persen	Rp300.742.700,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terlaksana dengan baik	100 Persen	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah asn/masyarakat yang mendapat sosialisasi peraturan perundang-undangan	80 Orang	Rp115.334.200,00

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rancangan produk hukum daerah yang memenuhi asas materi muatan peraturan perundang-undangan	100 Persen	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase rancangan produk hukum daerah yang telah diharmonisasi	100 Persen	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	250 Dokumen	Rp383.320.200,00
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	1 Kasus	Rp210.824.100,00
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase produk hukum daerah yang didokumentasikan	100 Persen	Rp88.543.500,00
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam dalam mendorong perkembangan perekonomian daerah	100 Persen	
		Nilai kinerja keuangan	Nilai 0,61	
		Nilai kinerja pelayanan	Nilai 0,5	
		Nilai kinerja operasional	Nilai 1,28	
		Nilai kinerja sumber daya manusia	Nilai 0,47	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Laporan kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian	25 Laporan	
		Laporan kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian	24 Dokumen	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan bumd dan blud	25 Laporan	Rp55.016.000,00
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	24 Dokumen	Rp705.510.700,00
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	3 Dokumen	Rp101.849.900,00
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Laporan kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam	16 Dokumen	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, kukm, penanaman modal, tenaga kerja	2 Dokumen	Rp6.300.800,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, statistik, persandian	2 Dokumen	Rp6.918.800,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan	12 Dokumen	Rp182.598.700,00
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase skpd yang menargetkan realisasi keuangan pada dpa-skpd >=50% pada semester i	80 Persen	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Surat edaran walikota tentang pedoman pelaksanaan penganggaran	1 Dokumen	
		Jumlah kegiatan monitoring yang dilaksanakan	2 Kegiatan	
		Jumlah kegiatan evaluasi yang dilaksanakan	4 Kegiatan	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah	2 Dokumen	Rp105.626.300,00
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	12 Laporan	Rp297.178.696,00
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	6 Laporan	Rp130.616.625,00
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase paket pengadaan barang/jasa yang diusulkan opd terlaksana secara akuntabel dan transparan	100 Persen	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase paket pengadaan barang/jasa yang diusulkan opd terlaksana secara akuntabel dan transparan	100 Persen	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	60 Dokumen	Rp344.935.600,00
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	60 Dokumen	Rp387.238.600,00
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	40 Orang	Rp22.293.600,00



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Merupakan Nilai Yang Diperoleh Dari Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat Yang Dilakukan Secara Elektronik Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat (Sikemas)	86,75 indeks	92,25 indeks	106,34%		Bagian Organisasi
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah (AKIP)	Nilai Akip Diperoleh Berdasarkan Hasil Evaluasi Yang Dilakukan Oleh Inspektorat	82	74,20	90,49%		Bagian Organisasi
		Temuan hasil pengawasan yang diselesaikan	(Jumlah Temuan Hasil Pengawasan Yang Diselesaikan / Jumlah Temuan Yang Ada) X 100%	100%	100%	100,00%		Bagian Umum
3.	Meningkatnya pelayanan kedinasan Walikota dan Wakil Walikota	Persentase tugas-tugas kedinasan Walikota dan Wakil Walikota diselesaikan tepat waktu	(Jumlah Tugas-Tugas Kedinasan Wali Kota Dan Wakil Walikota Diselesaikan Tepat Waktu / Jumlah Kedinasan Wali Kota Dan Wakil Walikota Yang Dilaksanakan) X 100%	100%	100%	100,00%		Bagian Umum
4.	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pengoordinasian tugas dan kinerja SKPD	Jumlah paket pengadaan barang/jasa pada SKPD yang dilakukan melalui proses tender disampaikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 4 bulan setelah APBD disahkan	(Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilakukan Melalui Proses Tender Disampaikan Kepada Bagian Pengadaan Setelah Apbd Disahkan / Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Harus Ditenderkan) X 100%	25%	73%	292,00%		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Jumlah SKPD yang realisasi keuangannya >= 40% pada semester I	(Jumlah Skpd Dengan Realisasi Keuangan >=40% Pada Semester I / Jumlah Skpd) X 100%	25%	68,75%	275,00%		Bagian Administrasi Pembangunan

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
		Jumlah SKPD yang realisasi fisik kegiatannya >=50% pada semester I	(Jumlah Skpd Dengan Realisasi Fisik Kegiatan $\geq 50\%$ Pada Semester I / Jumlah Skpd) X 100%	25%	46,87%	187,48%		Bagian Administrasi Pembangunan
		Jumlah SKPD yang nilai ikm-nya kategori sangat baik berdasarkan pengukuran survey kepuasan masyarakat yang dilakukan	(Jumlah Skpd Yang Nilai Ikm-Nya Kategori Sangat Baik / Jumlah Skpd) X 100%	30,61%	68,75%	224,60%		Bagian Organisasi
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kecamatan dengan kategori baik	(Jumlah Kecamatan Dengan Kategori Baik / Jumlah Kecamatan) X 100%	20%	20%	100,00%		Bagian Pemerintahan
		Jumlah Kelurahan dengan kategori baik	(Jumlah Kelurahan Dengan Kategori Baik / Jumlah Kelurahan) X 100%	20%	20%	100,00%		Bagian Pemerintahan
6.	Meningkatnya perkembangan Kelurahan	Jumlah Kelurahan dengan kategori cepat berkembang	(Jumlah Kelurahan Kategori Cepat Berkembang / Jumlah Kelurahan) X 100%	71,43%	71,43%	100,00%		Bagian Pemerintahan
7.	Terpenuhi asas pembentukan hukum yang baik	Persentase rancangan produk hukum daerah yang memenuhi asas pembentukan hukum yang baik	(Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Memenuhi Asas Pembentukan Hukum Yang Baik / Jumlah Rancangan Produk Hukum) X 100%	100%	100%	100,00%		Bagian Hukum
8.	Meningkatnya kinerja PDAM tirta bulian	Tingkat kesehatan PDAM Tirta Bulian	Tingkat Kesehatan Pdam Tirta Bulian Merupakan Nilai Yang Diperoleh Berdasarkan Hasil Evaluasi Yang Meliputi Penilaian Kinerja, Penilaian Tingkat Kesehatan, Dan Penilaian Pelayanan	2,86%	2,84%	99,30%		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



Tabel 5 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	86,5	86,11	99,55%	86,75 indeks	92,25 indeks	106,34%
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah (AKIP)	80	77,02	96,28%	82	74,20	90,49%
		Temuan hasil pengawasan yang diselesaikan	100%	98,98%	98,98%	100%	100%	100,00%
3.	Meningkatnya pelayanan kedinasan Walikota dan Wakil Walikota	Persentase tugas-tugas kedinasan Walikota dan Wakil Walikota diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
4.	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pengoordinasian tugas dan kinerja SKPD	Jumlah paket pengadaan barang/jasa pada SKPD yang dilakukan melalui proses tender disampaikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 4 bulan setelah APBD disahkan	20%	55%	275,00%	25%	73%	292,00%
		Jumlah SKPD yang realisasi keuangannya >= 40% pada semester I	25%	59%	236,00%	25%	68,75%	275,00%
		Jumlah SKPD yang realisasi fisik kegiatannya >=50% pada semester I	25%	25,64%	102,56%	25%	46,87%	187,48%
		Jumlah SKPD yang nilai ikm-nya kategori sangat baik berdasarkan pengukuran survey kepuasan masyarakat yang dilakukan	28,57%	42,86%	150,02%	30,61%	68,75%	224,60%
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kecamatan dengan kategori baik	20%	20%	100,00%	20%	20%	100,00%
		Jumlah Kelurahan dengan kategori baik	20%	20%	100,00%	20%	20%	100,00%
6.	Meningkatnya perkembangan Kelurahan	Jumlah Kelurahan dengan kategori cepat berkembang	71,43%	48,57%	68,00%	71,43%	71,43%	100,00%
7.	Terpenuhi asas pembentukan hukum yang baik	Persentase rancangan produk hukum daerah yang memenuhi asas pembentukan hukum yang baik	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
8.	Meningkatnya kinerja PDAM tirta bulian	Tingkat kesehatan PDAM Tirta Bulian	3,14	3.14	100,00%	2,86%	2,84%	99,30%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



Tabel 6 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Dibandingkan dengan RPJMD

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6 = 4/5 * 100$
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	92,25	86,75	106%
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah (AKIP)	74,20	82	90%
		Temuan hasil pengawasan yang diselesaikan	100%	100	100%
3.	Meningkatnya pelayanan kedinasan Walikota dan Wakil Walikota	Persentase tugas-tugas kedinasan Walikota dan Wakil Walikota diselesaikan tepat waktu	100%	100	100%
4.	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pengoordinasian tugas dan kinerja SKPD	Jumlah paket pengadaan barang/jasa pada SKPD yang dilakukan melalui proses tender disampaikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 4 bulan setelah APBD disahkan	73%	25	292%
		Jumlah SKPD yang realisasi keuangannya $\geq 40\%$ pada semester i	68,75%	25	275%
		Jumlah SKPD yang realisasi fisik kegiatannya $\geq 50\%$ pada semester i	46,87%	25	187%
		Jumlah SKPD yang nilai ikm-nya kategori sangat baik berdasarkan pengukuran survey kepuasan masyarakat yang dilakukan	68,75%	30,61	225%
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kecamatan dengan kategori baik	20%	20	100%
		Jumlah Kelurahan dengan kategori baik	20%	20	100%
6.	Meningkatnya perkembangan Kelurahan	Jumlah Kelurahan dengan kategori cepat berkembang	71,43%	71,43	100%
7.	Terpenuhi asas pembentukan hukum yang baik	Persentase rancangan produk hukum daerah yang memenuhi asas pembentukan hukum yang baik	100%	100	100%
8.	Meningkatnya kinerja PDAM tirta bulian	Tingkat kesehatan PDAM Tirta Bulian	2,84%	2,86	99%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



Tabel 7 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6 = 4/5*100
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	92,25 indeks		
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah (AKIP)	74,20		
		Temuan hasil pengawasan yang diselesaikan	100%		
3.	Meningkatnya pelayanan kedinasan Walikota dan Wakil Walikota	Persentase tugas-tugas kedinasan Walikota dan Wakil Walikota diselesaikan tepat waktu	100%		
4.	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pengoordinasian tugas dan kinerja SKPD	Jumlah paket pengadaan barang/jasa pada SKPD yang dilakukan melalui proses tender disampaikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 4 bulan setelah APBD disahkan	73%		
		Jumlah SKPD yang realisasi keuangannya >= 40% pada semester I	68,75%		
		Jumlah SKPD yang realisasi fisik kegiatannya >=50% pada semester I	46,87%		
		Jumlah SKPD yang nilai ikm-nya kategori sangat baik berdasarkan pengukuran survey kepuasan masyarakat yang dilakukan	68,75%		
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kecamatan dengan kategori baik	20%		
		Jumlah Kelurahan dengan kategori baik	20%		
6.	Meningkatnya perkembangan Kelurahan	Jumlah Kelurahan dengan kategori cepat berkembang	71,43%		
7.	Terpenuhi asas pembentukan hukum yang baik	Persentase rancangan produk hukum daerah yang memenuhi asas pembentukan hukum yang baik	100%		
8.	Meningkatnya kinerja PDAM tirta bulian	Tingkat kesehatan PDAM Tirta Bulian	2,84%		



Tabel 8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	86,75 indeks	92,25 indeks	106,34%	<p>Indikator Kinerja IKM berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, hal-hal yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan tsb adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Monev Pelayanan Publik dengan Survei langsung ke seluruh Perangkat Daerah dan Unit Pelayanan yang ada di Kota Tebing Tinggi. 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat menggunakan Portal SITALAKBAJAKUNREB Aplikasi SIKEMAS, sehingga dalam proses Monev SKM dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif. 3. Rutin membuat rapat monev pelayanan publik dengan mengundang seluruh Perangkat Daerah dan Unit Pelayanan yang ada di Kota Tebing Tinggi. 4. Memberikan penghargaan berupa sertifikat kepada Perangkat Daerah atau Unit Pelayanan yang berhasil mendapatkan IKM tertinggi. <hr/> <p>Persentase realisasi melampaui target yang ada hal ini terjadi karena adanya kolaborasi dari beberapa OPD dan</p>	<p>Untuk lebih meningkatkan pencapaian IKM ke depannya, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah: Meningkatkan kualitas Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana kepada Seluruh Perangkat Daerah dan Unit Pelayanan yang ada di Kota Tebing Tinggi.</p> <hr/> <p>Terus melakukan sinergi dan kolaborasi antar OPD dan instansi yang terkait.</p>

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						instansi terkait. Sehingga bersinergi menjadi hasil yang maksimal.	
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah (AKIP)	82	74,20	90,49%	Pencapaian Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi hanya tercapai sebesar 90,48%, hal-hal yang menjadi penyebab dari belum berhasilnya indikator tsb tercapai adalah : 1. Kurang lengkapnya data dokumen SAKIP yang diupload pada esr menpan karena ada bagian yang tidak menginput data DPA Perubahan pada Portal Sitalakbajakunreb Aplikasi e-SAKIP. Kurangnya SDM pada hampir setiap bagian di Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.	Solusi yang dapat dilakukan ke depannya agar Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi dapat berhasil adalah dengan Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan profesionalitas kerja seluruh ASN yang ada di Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi serta Menambah kapasitas SDM yang menangani SAKIP di Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi
		Temuan hasil pengawasan yang diselesaikan	100%	100%	100,00%	Persentase realisasi dan capaian tidak sesuai dengan target dikarenakan terdapat kelebihan/silpa anggaran pembayaran gaji dan tunjangan PNS. Hal ini disebabkan pada saat penganggaran untuk penyedia gaji dan tunjangan PNS memang dilebihkan untuk mencegah adanya kekurangan pembayaran gaji dan tunjangan PNS yang disebabkan adanya mutasi masuk pegawai, kenaikan pangkat/ berkala PNS yang dirapel dan kenaikan pembayaran iuran BPJS, JKK dan JKM.	Melakukan perkiraan anggaran dengan tepat dan teliti dengan menganalisis data anggaran tahun-tahun sebelumnya agar anggaran bisa terserap sesuai target atau tidak menghasilkan SILPA yang bernilai besar
3.	Meningkatnya pelayanan kedinasan Walikota dan Wakil Walikota	Persentase tugas-tugas kedinasan Walikota dan Wakil Walikota diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100,00%	Persentase realisasi melebihi target yang telah ditetapkan dan anggaran terserap dengan sempurna, dimana kegiatan-	Target untuk penyerapan anggaran ditingkatkan lagi

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						kegiatan yang berkaitan dengan kedinasan KDH dan WKDH terfasilitasi dengan baik.	untuk tahun berikutnya agar tercapai hingga 100%
4.	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pengoordinasian tugas dan kinerja SKPD	Jumlah paket pengadaan barang/jasa pada SKPD yang dilakukan melalui proses tender disampaikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 4 bulan setelah APBD disahkan	25%	73%	292%	Monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan barang/jasa yang telah direncanakan dalam SiRUP	Melakukan pendekatan langsung kepada OPD, baik dengan memberikan surat edaran, ataupun mengingatkan secara lisan
		Jumlah SKPD yang realisasi keuangannya \geq 40% pada semester i	25%	68,75%	275,00%	Indikator ini digunakan untuk melihat efektivitas peyelenggaraan pengoordinasian tugas dan kinerja SKPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Monitoring dan evaluasi setiap bulan dilaksanakan untuk agar realisasi keuangan SKPD dapat efektif dan penyerapan anggaran dapat cepat dilaksanakan. Apabila realisasi keuangan dapat cepat dilaksanakan, diharapkan dapat berdampak peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Tebing Tinggi. Target yang ditetapkan pada Tahun 2022 adalah 25% dan Realisasinya pada tahun 2021 adalah 68,75%, hasil yang dicapai lebih dari yang ditargetkan sehingga capaian kinerja mencapai 275%.	
		Jumlah SKPD yang realisasi fisik kegiatannya \geq 50% pada semester i	25%	46,87%	187,48%	Indikator ini digunakan untuk melihat efektivitas peyelenggaraan pengoordinasian tugas dan kinerja SKPD yang ada di Lingkungan	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						<p>Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Monitoring dan evaluasi setiap bulan dilaksanakan untuk agar realisasi fisik kegiatan SKPD dapat efektif dan penyerapan anggaran dapat cepat dilaksanakan. Apabila realisasi fisik kegiatan dapat cepat dilaksanakan, diharapkan dapat berdampak peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Tebing Tinggi.</p> <p>Target yang ditetapkan pada Tahun 2022 adalah 25% dan Realisasinya pada tahun 2021 adalah 46,87%, hasil yang dicapai lebih dari yang ditargetkan sehingga capaian kinerja mencapai 187,48%.</p>	
		Jumlah SKPD yang nilai ikm-nya kategori sangat baik berdasarkan pengukuran survey kepuasan masyarakat yang dilakukan	30,61%	68,75%	224,60%	<p>Indikator Kinerja sangat berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, hal-hal yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan tsb adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Monev Pelayanan Publik dengan Survei langsung ke seluruh Perangkat Daerah dan Unit Pelayanan yang ada di Kota Tebing Tinggi. 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat menggunakan Portal SITALAKBAJAKUNREB Aplikasi SIKEMAS, sehingga dalam proses Monev SKM dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif. 	<p>Untuk lebih meningkatkan pencapaian IKM ke depannya, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah: Meningkatkan kualitas Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana kepada Seluruh Perangkat Daerah dan Unit Pelayanan yang ada di Kota Tebing Tinggi</p>

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						3. Rutin membuat rapat monev pelayanan publik dengan mengundang seluruh Perangkat Daerah dan Unit Pelayanan yang ada di Kota Tebing Tinggi. Memberikan penghargaan berupa sertifikat kepada Perangkat Daerah atau Unit Pelayanan yang berhasil mendapatkan IKM tertinggi.	
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kecamatan dengan kategori baik	20%	20%	100,00%	koordinasi dan pendampingan dengan Pemerintahan Kecamatan untuk meningkatkan penataan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang akuntabel	Meningkatkan koordinasi dan pendampingan pemerintahan kecamatan untuk meningkatkan penataan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang akuntabel
		Jumlah Kelurahan dengan kategori baik	20%	20%	100,00%	koordinasi dan pendampingan dengan Pemerintahan Kelurahan untuk meningkatkan penataan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang akuntabel	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aparat kelurahan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan
6.	Meningkatnya perkembangan Kelurahan	Jumlah Kelurahan dengan kategori cepat berkembang	71,43%	71,43%	100,00%	(penilaian masih dilaksanakan)	(penilaian masih dilaksanakan)
7.	Terpenuhi asas pembentukan hukum yang baik	Persentase rancangan produk hukum daerah yang memenuhi asas pembentukan hukum yang baik	100%	100%	100,00%	1. Sumber Daya Manusia (ASN) yang berkompeten 2. Sarana dan Prasarana yang memadai	
8.	Meningkatnya kinerja PDAM tirta bulian	Tingkat kesehatan PDAM Tirta Bulian	2,86%	2,84%	99,30%	Kurangnya partisipasi pengelola BUMD dan BLUD	Perlunya dibentuk tim pembinaan pengelolaan BUMD dan BLUD



Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.2.1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian kinerja 106,34% sudah lebih memenuhi target, adapun hal-hal yang mempengaruhi pencapaian ini adalah :

- Seluruh Bagian di Sekretariat Daerah Kota telah menetapkan dan mempublikasikan Dokumen Standar Pelayanan, serta memberikan pelayanan sesuai dengan standar tersebut sehingga masyarakat pengguna layanan memahami dan mendapat kepastian tentang pelayanan
- Petugas pemberi layanan telah melakukan tugasnya dengan baik, dan diharapkan agar petugas meningkatkan kompetensi dan keramahan
- Adanya mesin kiosk di lobi Balai Kota serta adanya petugas resepsionis disana yang mengarahkan pengguna layanan untuk mengisi kuisioner survei kepuasan masyarakat, sehingga pelaksanaan survei berjalan dengan baik dan hasilnya dapat menggambarkan kepuasan pengguna layanan seluruh Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi
- Optimalisasi Monev Pelayanan Publik dengan Survei langsung ke seluruh Perangkat Daerah dan Unit Pelayanan yang ada di Kota Tebing Tinggi.
- Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat menggunakan Portal SITALAKBAJAKUNREB Aplikasi SIKEMAS, sehingga dalam proses Monev SKM dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif.
- Rutin membuat rapat monev pelayanan publik dengan mengundang seluruh Perangkat Daerah dan Unit Pelayanan yang ada di Kota Tebing Tinggi.
- Memberikan penghargaan berupa sertifikat kepada Perangkat Daerah atau Unit Pelayanan yang berhasil mendapatkan IKM tertinggi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan IKM Sekretariat Daerah Kota di tahun-tahun mendatang maka perlu dilakukan :

- Koordinasi seluruh Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi dalam pembenahan dokumen Standar Pelayanan Sekretariat Daerah Kota dan publikasi yang terpadu



- Melakukan internalisasi standar pelayanan kepada seluruh personil di Sekretariat Daerah sehingga setiap orang memahami dan dapat mengarahkan pengguna layanan kepada petugas terkait
- Meningkatkan kompetensi petugas layanan dengan mengikutsertakan pada pendidikan dan pelatihan terkait
- Melakukan perawatan secara berkesinambungan terhadap seluruh fasilitas pendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang sudah ada (kebersihan gedung, toilet, jalur landai, ruang laktasi, dll) serta melengkapi fasilitas yang belum ada seperti tempat bermain anak dan pojok baca

3.2.2. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja organisasi

1. Nilai Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Pencapaian Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi hanya tercapai sebesar 90,48%, hal-hal yang menjadi penyebab dari belum berhasilnya indikator tsb tercapai adalah :

- Kurang lengkapnya data dokumen SAKIP yang diupload pada esr menpan karena ada bagian yang tidak menginput data DPA Perubahan pada Portal Sitalakbajakunreb Aplikasi e-SAKIP.
- Kurangnya SDM pada hampir setiap bagian di Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.
- Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pada PD hingga level yang paling rendah belum berjalan dengan baik. Kondisi ini menyebabkan efektivitas pengendalian dalam rangka pencapaian kinerja belum optimal.

Solusi yang dapat dilakukan ke depannya agar Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi dapat berhasil adalah dengan

- Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan profesionalitas kerja seluruh ASN yang ada di Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.
- Menambah kapasitas SDM yang menangani SAKIP di Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi dan melaksanakan rekomendasi dari KemenpanRB untuk Perbaikan SAKIP.
- Melakukan evaluasi internal atas implementasi manajemen kinerja PD serta meningkatkan kualitas evaluasi dengan memberikan rekomendasi – rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk mendorong perbaikan AKIP yang berkelanjutan terhadap masing-masing OPD.



2. Temuan hasil pengawasan yang diselesaikan.

• Realisasi Tahun 2022

Temuan hasil pengawasan yang diselesaikan, Target yang ditetapkan pada Tahun 2022 adalah 100% dan Realisasinya pada tahun 2022 adalah 96.62%. dengan penjelasan Terjadi Persentase realisasi dan capaian tidak sesuai dengan target dikarenakan terdapat kelebihan/silpa anggaran pembayaran gaji dan tunjangan PNS. Hal ini disebabkan pada saat penganggaran untuk penyedia gaji dan tunjangan PNS memang diletakkan untuk mencegah adanya kekurangan pembayaran gaji dan tunjangan PNS yang disebabkan adanya mutasi masuk pegawai, kenaikan pangkat/ berkala PNS yang dirapel dan kenaikan pembayaran iuran BPJS, JKK dan JKM..

• Perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya

Jika dilihat pada tahun 2021 untuk realisasi Temuan hasil pengawasan yang diselesaikan sebesar 98.98% jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 96.62.

• Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Persentase realisasi dan capaian tidak sesuai dengan target karena kelebihan/silpa anggaran yang tidak terserap akibat saat penganggaran untuk penyediaan gaji diletakkan untuk mencegah adanya kekurangan saat adanya PNS yang mutasi masuk dan/atau kenaikan pangkat/berkala

• Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Program/Kegiatan yang mendukung Temuan hasil pengawasan yang diselesaikan sebagai berikut :

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- 1.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 3.Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 5.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggarannya



2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 19,188,957,444 realisasi sebesar Rp. 2,809,106,815 (96.62%).

3.2.3. Meningkatnya pelayanan kedinasan Walikota dan Wakil Walikota

1. Persentase tugas-tugas kedinasan Walikota dan Wakil Walikota diselesaikan tepat waktu.

• Realisasi Tahun 2022

Persentase tugas-tugas kedinasan Walikota dan Wakil Walikota diselesaikan tepat waktu, Target yang ditetapkan pada Tahun 2022 adalah 100% dan Realisasinya pada tahun 2022 adalah 99.03%. dengan penjelasan tersedianya Pakaian Dinas KDH/ WKDH dan Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga KDH/ WKDH apabila dibandingkan antara realisasi dan target maka diperoleh capaian kinerja 99.03%.

• Perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya

Jika dilihat pada tahun 2021 untuk realisasi Persentase tugas-tugas kedinasan Walikota dan Wakil Walikota diselesaikan tepat waktu sebesar 99.45%% jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 99.03%.

• Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Persentase realisasi dan capaian tidak sesuai dengan target karena pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya masih ada anggaran yang tidak terserap dikarenakan pada saat merealisasikan anggaran ada negosiasi harga sehingga anggaran tidak terserap sepenuhnya.



- **Analisis Program/Kegiatan Penunjang**

Program/Kegiatan yang mendukung Temuan hasil pengawasan yang diselesaikan sebagai berikut :

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : 1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Fasilitasi Kunjungan Tamu
3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Daerah
4. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.

dengan anggaran Rp.2,836,615,400 realisasi sebesar Rp. 2,809,106,815 (99.03%).

1. Jumlah SKPD yang Nilai IKM-Nya Kategori Sangat Baik berdasarkan Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat yang Dilakukan.

Capaian kinerja 224,6% sudah melampaui target, adapun hal-hal yang mempengaruhi pencapaian ini adalah :

- Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan telah melakukan survei kepuasan masyarakat melalui aplikasi Sikemas secara berkesinambungan yang diiringi dengan peningkatan keramahan, pembenahan fasilitas pendukung serta penanganan pengaduan yang baik.
- Bagian Organisasi secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik seluruh Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan, dengan meninjau secara langsung ke Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan setiap tiga bulan sekali. Kegiatan ini membuat seluruh Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan 'dipaksa' untuk menjaga kualitas pelayanan publik masing-masing, termasuk IKM-nya
- Telah dilakukan pemberian Piagam Penghargaan Wali Kota Tebing Tinggi kepada Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan Terbaik dengan mempedomani nilai hasil monitoring dan evaluasi yang disebutkan di atas. Piagam Penghargaan ini memacu setiap Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan bersaing untuk meningkatkan Nilai IKM masing-masing.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan yang Nilai IKM-nya kategori Sangat Baik di tahun mendatang maka perlu dilakukan :

- Mempertahankan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik setiap tiga bulan sekali

Memberikan 'award' kepada Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan dengan nilai terbaik dan 'punishment' kepada Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan dengan nilai terendah menurut hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Analisis Keberhasilan / Kegagalan

Adapun hal-hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target untuk Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi :

3.2.4. Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pengoordinasian Tugas Dan Kinerja SKPD.

- 1. Jumlah paket pengadaan barang/jasa pada SKPD yang dilakukan melalui proses tender disampaikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 4 bulan setelah APBD disahkan**

Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pengoordinasian tugas dan kinerja SKPD dihitung dengan formula perhitungan yaitu Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui tender disampaikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa setelah APBD disahkan dibagi Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang harus ditenderkan dikali 100%. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formula indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.

No	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pengoordinasian Tugas dan Kinerja SKPD	Jumlah paket pengadaan barang/jasa pada SKPD yang dilakukan melalui Proses tender disampaikan kepada Bagian pengadaan barang dan jasa 4 Bulan setelah APBD disahkan	(Jlh paket pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui tender disampaikan kepada Bagian Pengadaan setelah APBD disahkan / Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang harus ditenderkan) x 100%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



Kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pengoordinasian Tugas dan Kinerja SKPD digambarkan pada table berikut :

Tabel Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator	2021				Target Akhir Suplemen Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
		Realisasi 2021	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah paket pengadaan barang/jasa pada SKPD yang dilakukan melalui proses tender disampaikan kepada Bagian pengadaan barang dan jasa 4 bulan setelah APBD disahkan	55%	25%	73%	292%	25%	25%

Capaian kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD yang dilakukan melalui Proses Tender disampaikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 4 Bulan setelah APBD disahkan dinyatakan BERHASIL, hal ini ditunjukkan dengan realisasi sebesar 73 persen dari target pada tahun ini sebesar 25 persen yang berarti capaian kinerja untuk indikator ini tercapai 292 persen (sangat baik).

Realisasi ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 55 persen, serta juga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Suplemen renstra

**Tabel
Persentase Target Kinerja Tahunan Jangka Menengah terhadap Realisasi
Kinerja Tahun 2022**

No		Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Target	-	-	100	100	20	25
2	Presentase	-	-	99	100	55	73

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan.
 - Penyebab Keberhasilan.
 - Dukungan dana yang mencukupi.



- Adanya kerjasama yang baik antar OPD.
- Penyebab Kegagalan.
 - Perencanaan yang kurang tepat.
 - Terlambatnya OPD mengirimkan permohonan tender/seleksi
 - Sarana dan prasarana pendukung yang kurang.
 - Kualitas dan kuantitas SDM belum optimal.
- Solusi.
 - Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan.
 - Melakukan monitoring dan teguran terhadap keterlambatan permohonan tender/seleksi
 - Mengadakan sarana dan prasarana pendukung.
 - Meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada anggaran tahun 2022 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi terhadap efisiensi anggaran pada beberapa bidang antara lain :

Tabel Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)
1	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	344,935,600	343,935,950	999.650
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	387,238,600	386,446,840	791.760
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	22,293,600	22,032,520	261.080
	Jumlah	749.975.800	732.270.553	2.052.490

- Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Dari 3 (tiga) program yang diprogramkan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi pada tahun anggaran 2022 tidak ada kegiatan yang gagal dilaksanakan.



2. Jumlah SKPD dengan realisasi keuangan $\geq 40\%$ pada Semester I.

Indikator ini digunakan untuk melihat efektivitas peyelenggaraan pengoordinasian tugas dan kinerja SKPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Monitoring dan evaluasi setiap bulan dilaksanakan untuk agar realisasi keuangan SKPD dapat efektif dan penyerapan anggaran dapat cepat dilaksanakan. Apabila realisasi keuangan dapat cepat dilaksanakan, diharapkan dapat berdampak peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Tebing Tinggi. Berikut realisasi keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada Semester I Tahun 2022.

Tabel Realisasi Keuangan sampai dengan Semester I Tahun 2022.

No	SKPD	Realisasi Keuangan s.d Semester I (%)
1	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	58,40
2	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	58,22
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	57,76
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	56,40
5	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	54,03
6	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	52,05
7	Kecamatan Padang Hilir	50,92
8	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	50,55
9	Kecamatan Padang Hulu	49,79
10	Satuan Polisi Pamong Praja	47,95
11	Dinas Perhubungan	47,88
12	Kecamatan Bajenis	47,58
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	47,55
14	Kecamatan Rambutan	47,09
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	45,94
16	Dinas Sosial	44,42
17	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	44,10
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	42,88
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	42,84
20	Inspektorat	42,11
21	Sekretariat Daerah	41,73
22	Dinas Lingkungan Hidup	40,71
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39,85
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39,65
25	Dinas Kesehatan	37,13
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35,84
27	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	34,67
28	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	30,64
29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29,02
30	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	28,00
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	27,37
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13,64

- **Realisasi Tahun 2022**



Target yang ditetapkan pada Tahun 2022 adalah 25% dan Realisasinya pada tahun 2022 adalah 68,75%, hasil yang dicapai lebih dari yang ditargetkan sehingga capaian kinerja mencapai 275%.

- **Perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya**

Pada tahun 2021, target yang ditetapkan adalah 25% dan realisasi sebesar 51,28%. Realisasi mengalami peningkatan dari tahun 2022.

- **Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

Adapun hal-hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target :

- Kurangnya koordinasi yang dilakukan kepada SKPD untuk melaksanakan realisasi keuangan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun;
- Kurangnya penegasan dalam bentuk *reward* atau *punishment* kepada SKPD untuk melaksanakan realisasi keuangan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target jumlah SKPD dengan realisasi keuangan $\geq 40\%$ pada Semester I tersebut antara lain :

- Mengkoordinasikan SKPD melalui Surat Edaran Walikota tentang Efektivitas Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, agar SKPD menargetkan realisasi keuangan pada semester I diatas $\geq 40\%$.
- Mengkoordinasikan SKPD setiap bulannya melalui rapat koordinasi untuk memonitoring realisasi keuangan SKPD.

- **Analisis Program/Kegiatan Penunjang**

Program/Kegiatan yang mendukung indikator jumlah SKPD dengan realisasi keuangan $\geq 40\%$ pada semester I sebagai berikut :

Program : Program Perekonomian dan Pembangunan

Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Sub Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dengan anggarannya Rp. 297.178.696 dan realisasi Rp. 233.390.134 (78,54%).

3. Jumlah SKPD dengan realisasi fisik kegiatan $\geq 50\%$ pada Semester I.

Indikator ini digunakan untuk melihat efektivitas peyelenggaraan pengoordinasian tugas dan kinerja SKPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Monitoring dan evaluasi setiap bulan dilaksanakan untuk agar realisasi fisik kegiatan SKPD dapat efektif dan

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



penyerapan anggaran dapat cepat dilaksanakan. Apabila realisasi fisik kegiatan dapat cepat dilaksanakan, diharapkan dapat berdampak peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Tebing Tinggi. Berikut realisasi fisik kegiatan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada Semester I Tahun 2022.

Tabel Realisasi Fisik Kegiatan sampai dengan Semester I Tahun 2022.

No	SKPD	Realisasi fisik kegiatan s.d Semester I (%)
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	68,33
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	67,08
3	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	66,00
4	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	64,32
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	60,00
6	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	60,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	55,97
8	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	55,08
9	Kecamatan Rambutan	54,67
10	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	54,03
11	Sekretariat Daerah	52,77
12	Kecamatan Padang Hilir	51,00
13	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	50,54
14	Dinas Lingkungan Hidup	50,00
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	50,00
16	Kecamatan Padang Hulu	49,79
17	Inspektorat	49,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	48,00
19	Satuan Polisi Pamong Praja	48,00
20	Kecamatan Bajenis	47,58
21	Dinas Kesehatan	45,00
22	Dinas Perhubungan	44,34
23	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	43,93
24	Dinas Sosial	43,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	42,25
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	40,06
27	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	39,67
28	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	35,63
29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33,87
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	31,96
31	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	30,98
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25,00

- **Realisasi Tahun 2022**

Target yang ditetapkan pada Tahun 2022 adalah 25% dan Realisasinya pada tahun 2022 adalah 46,87%, hasil yang dicapai lebih dari yang ditargetkan sehingga capaian kinerja mencapai 187,48%.

- **Perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya**



Pada tahun 2021, target yang ditetapkan adalah 25% dan realisasi sebesar 25,64%. Realisasi mengalami peningkatan dari tahun 2022.

- **Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

Adapun hal-hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target :

- Kurangnya koordinasi yang dilakukan kepada SKPD untuk melaksanakan realisasi fisik kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun;
- Kurangnya penegasan dalam bentuk *reward* atau *punishment* kepada SKPD untuk melaksanakan realisasi fisik kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target jumlah SKPD dengan realisasi fisik kegiatan $\geq 50\%$ pada Semester I tersebut antara lain :

- Mengkoordinasikan SKPD melalui Surat Edaran Walikota tentang Efektivitas Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, agar SKPD menargetkan realisasi fisik kegiatan pada semester I diatas $\geq 50\%$.
- Mengkoordinasikan SKPD setiap bulannya melalui rapat koordinasi untuk memonitoring realisasi fisik kegiatan SKPD.

- **Analisis Program/Kegiatan Penunjang**

Program/Kegiatan yang mendukung indikator jumlah SKPD dengan realisasi fisik kegiatan $\geq 50\%$ pada semester I sebagai berikut :

Program : Program Perekonomian dan Pembangunan

Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Sub Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dengan anggarannya Rp. 297.178.696 dan realisasi Rp. 233.390.134 (78,54%).

4. Jumlah SKPD yang Nilai IKM-Nya Kategori Sangat Baik berdasarkan Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat yang Dilakukan.

Capaian kinerja 224,6% sudah melampaui target, adapun hal-hal yang mempengaruhi pencapaian ini adalah :

- Seluruh Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan telah melakukan survei kepuasan masyarakat melalui aplikasi Sikemas secara berkesinambungan yang diiringi dengan peningkatan



keramahan, pembenahan fasilitas pendukung serta penanganan pengaduan yang baik.

- Bagian Organisasi secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik seluruh Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan, dengan meninjau secara langsung ke Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan setiap tiga bulan sekali. Kegiatan ini membuat seluruh Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan 'dipaksa' untuk menjaga kualitas pelayanan publik masing-masing, termasuk IKM-nya
- Telah dilakukan pemberian Piagam Penghargaan Wali Kota Tebing Tinggi kepada Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan Terbaik dengan mempedomani nilai hasil monitoring dan evaluasi yang disebutkan di atas. Piagam Penghargaan ini memacu setiap Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan bersaing untuk meningkatkan Nilai IKM masing-masing.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan yang Nilai IKM-nya kategori Sangat Baik di tahun mendatang maka perlu dilakukan :

- Mempertahankan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik setiap tiga bulan sekali
- Memberikan 'award' kepada Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan dengan nilai terbaik dan 'punishment' kepada Perangkat Daerah/ Unit Pelayanan dengan nilai terendah menurut hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

3.2.5. Sasaran Terpenuhi Asas Pembentukan Hukum yang Baik.

1. Persentase rancangan produk hukum daerah yang memenuhi asas pembentukan hukum yang baik

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.



NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	2022	TARGET AKHIR 2023	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
1.	Terpenuhi Asas Pembentukan Hukum Yang Baik	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Memenuhi Asas Pembentukan Hukum Yang Baik	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Pemahaman ASN/Masyarakat tentang peraturan perundang-undangan	Persentase sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terlaksana dengan baik	100%	100%	100%

- **Realisasi Tahun 2022.**

Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Memenuhi Asas Pembentukan Hukum Yang Baik pada Tahun 2022 sesuai target tercapai 100%.

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi : 4

Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi : 33

Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi : 489

Persentase sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terlaksana dengan baik pada Tahun 2022 sesuai target tercapai 100%

- **Perbandingan Realisasi dengan Tahun sebelumnya.**

Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Memenuhi Asas Pembentukan Hukum Yang Baik pada Tahun 2021 sesuai target tercapai 100%, dan untuk Tahun Buku 2020 juga 100%.

Jadi perbandingan realisasi Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Memenuhi Asas Pembentukan Hukum Yang Baik pada Tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya sesuai target tercapai 100%.

Persentase sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terlaksana dengan baik pada Tahun 2021 sesuai target tercapai 100%, dan untuk Tahun Buku 2020 juga 100%.

Jadi perbandingan realisasi Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Memenuhi Asas Pembentukan Hukum Yang Baik pada



Tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya sesuai target tercapai 100%.

- **Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

Dengan melihat hasil pelaksanaan program dan kegiatan hampir tidak ditemukan permasalahan yang berarti.

Beberapa hal yang menjadi factor penunjang keberhasilan adalah :

- Sumber Daya Manusia (ASN) yang berkompeten
- Sarana dan Prasarana yang memadai

- **Analisis Program/Kegiatan Penunjang**

Program/Kegiatan yang mendukung indikator Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang memenuhi Asas Pembentukan Hukum yang baik adalah:

Program : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dengan anggarannya Rp. 383.320.200 dan realisasi Rp. 376.619.010 (91,85%).

3.2.6. Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan.

1. Jumlah Kecamatan dengan kategori baik.

- **Realisasi Tahun 2022**

Target yang ditetapkan pada Tahun 2022 adalah 20% dan Realisasinya pada tahun 2022 mencapai 20%, hasil yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100% (kinerja sangat baik).

- **Perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya**

Realisasi tahun 2021 dengan tahun 2022 mencapai 100%. Dengan tiap tahunnya mencapai 100% diharapkan harus menjadi acuan bagi seluruh Kecamatan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi semua masyarakat.

- **Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

Adapun hal-hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target :



- Kurangnya Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan kecamatan dalam dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan .
- Pelaksanaan program dan kegiatan yang kurang optimal dikarenakan terbatasnya anggaran.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana di Kecamatan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target jumlah Kecamatan dengan kategori baik, antara lain:

- Meningkatkan koordinasi dan pendampingan dengan Pemerintahan Kecamatan untuk meningkatkan penataan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang akuntabel.
 - Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap aparat kecamatan dalam dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
 - Meningkatkan sarana dan prasarana di kecamatan.
 - Penyusunan program dan kegiatan dengan perencanaan yang lebih baik.
- Analisis Program/Kegiatan Penunjang
Program/Kegiatan yang mendukung indikator target jumlah Kecamatan dengan kategori baik, sebagai berikut :
Program : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan
Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan
Sub Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan anggarannya Rp. 399.076.300 dan realisasi Rp. 381.192.812 (95,52%).

2. Jumlah Kelurahan dengan kategori baik.

- Realisasi Tahun 2022
Target yang ditetapkan pada Tahun 2022 adalah 20% dan Realisasinya pada tahun 2022 mencapai 20%, hasil yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100% (kinerja sangat baik).
- Perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya
Realisasi tahun 2021 dengan tahun 2022 mencapai 100%. Dengan tiap tahunnya mencapai 100% diharapkan harus menjadi acuan bagi seluruh Kelurahan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi semua masyarakat.



- Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Adapun hal-hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target :

- Kurangnya Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Kelurahan dalam dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan .
- Pelaksanaan program dan kegiatan yang kurang optimal dikarenakan terbatasnya anggaran.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana di Kelurahan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target jumlah Kelurahan dengan kategori baik, antara lain:

- Meningkatkan koordinasi dan pendampingan dengan Pemerintahan Kelurahan untuk meningkatkan penataan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang akuntabel.
- Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap aparat Kelurahan dalam dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- Meningkatkan sarana dan prasarana di Kelurahan.
- Penyusunan program dan kegiatan dengan perencanaan yang lebih baik.

- Analisis Program/Kegiatan Penunjang

Program/Kegiatan yang mendukung indikator target jumlah Kecamatan dengan kategori baik, sebagai berikut :

Program : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan

Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan

Sub Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan anggarannya Rp. 399.076.300 dan realisasi Rp. 381.192.812 (95,52%).

3.2.7. Sasaran Meningkatnya Perkembangan Kelurahan.

1. Jumlah kelurahan dengan kategori cepat berkembang.

Salah satu indikator meningkatnya perkembangan kelurahan adalah meningkatnya jumlah kelurahan dengan kategori cepat berkembang. Penilaian dan pemeringkatan Kelurahan berdasarkan kategori Kurang Berkembang, Berkembang, dan Cepat Berkembang berdasarkan Permendagri No.81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



Berdasarkan Evaluasi Perkembangan Kelurahan yang dilakukan pada tahun anggaran 2021 terdapat 17 Kelurahan di Kota Tebing Tinggi yang masuk dalam aktegori “Cepat Berkembang” dan sisanya sebanyak 18 Kelurahan masuk dalam kategori “Berkembang”. Jika dipersentasekan maka jumlah Kelurahan yang masuk kategori Cepat Berkembang yang dilakukan pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar 48,57%, sedangkan untuk Tahun 2022 Penilaian masih sedang di laksanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL JUMLAH KELURAHAN DENGAN KATEGORI CEPAT BERKEMBANG DI KOTA TEBING TINGGI

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	SKOR	KATEGORI
1	BAJENIS	BANDAR SAKTI	353	CEPAT BERKEMBANG
2	BAJENIS	PELITA	336	BERKEMBANG
3	BAJENIS	DURIAN	357	CEPAT BERKEMBANG
4	BAJENIS	BULIAN	350	CEPAT BERKEMBANG
5	BAJENIS	TELUK KARANG	332	BERKEMBANG
6	BAJENIS	PINANG MANCUNG	302	BERKEMBANG
7	BAJENIS	BEROHOL	341	BERKEMBANG
8	PADANG HILIR	TAMBANGAN	331	BERKEMBANG
9	PADANG HILIR	DAMAR SARI	348	BERKEMBANG
10	PADANG HILIR	SATRIA	323	BERKEMBANG
11	PADANG HILIR	TEBING TINGGI	353	CEPAT BERKEMBANG
12	PADANG HILIR	DEBL0D SUNDORO	323	BERKEMBANG
13	PADANG HILIR	BAGELEN	358	CEPAT BERKEMBANG
14	PADANG HILIR	TAMBANGAN HULU	352	CEPAT BERKEMBANG
15	PADANG HULU	BANDARSONO	360	CEPAT BERKEMBANG
16	PADANG HULU	TUALANG	342	BERKEMBANG
17	PADANG HULU	PADANG MERBAU	357	CEPAT BERKEMBANG
18	PADANG HULU	PABATU	363	CEPAT BERKEMBANG
19	PADANG HULU	LUBUK BARU	353	CEPAT BERKEMBANG
20	PADANG HULU	LUBUK RAYA	388	CEPAT BERKEMBANG
21	PADANG HULU	PERSIAKAN	357	CEPAT BERKEMBANG
22	RAMBUTAN	MEKAR SENTOSA	413	CEPAT BERKEMBANG
23	RAMBUTAN	RANTAU LABAN	346	BERKEMBANG
24	RAMBUTAN	SRI PADANG	329	BERKEMBANG
25	RAMBUTAN	KARYA JAYA	326	BERKEMBANG
26	RAMBUTAN	LALANG	369	CEPAT BERKEMBANG
27	RAMBUTAN	TANJUNG MARULAK	364	CEPAT BERKEMBANG
28	RAMBUTAN	TANJUNG MARULAK HILIR	317	BERKEMBANG
29	TEBING TINGGI KOTA	TEBING TINGGI LAMA	316	BERKEMBANG
30	TEBING TINGGI KOTA	BANDAR UTAMA	309	BERKEMBANG
31	TEBING TINGGI KOTA	BADAK BEJUANG	365	CEPAT BERKEMBANG
32	TEBING TINGGI KOTA	PASAR BARU	305	BERKEMBANG
33	TEBING TINGGI KOTA	MANDAILING	357	CEPAT BERKEMBANG
34	TEBING TINGGI KOTA	RAMBUNG	330	BERKEMBANG

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	SKOR	KATEGORI
35	TEBING TINGGI KOTA	PASAR GAMBIR	330	BERKEMBANG

- **Realisasi Tahun 2022**
Target yang ditetapkan pada Tahun 2022 adalah 71,43% dan untuk Realisasinya pada tahun 2022 masih dalam tahap penilaian sehingga angka realisasinya belum ada.
- **Perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya**
Dikarenakan masih dalam tahap penilaian dan angka realisasinya belum ada, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.
- **Analisis Keberhasilan/Kegagalan**
Adapun hal-hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target :
 - Kurangnya Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan kelurahan dalam dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan .
 - Pelaksanaan program dan kegiatan yang kurang optimal dikarenakan terbatasnya anggaran.
 - Masih kurangnya sarana dan prasarana di Kelurahan.
 Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target jumlah Kelurahan dengan kategori baik, antara lain:
 - Meningkatkan koordinasi dan pendampingan dengan Pemerintahan Kelurahan untuk meningkatkan penataan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan yang akuntabel.
 - Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap aparat Kelurahan dalam dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
 - Meningkatkan sarana dan prasaranan di Kelurahan.
 - Penyusunan program dan kegiatan dengan perencanaan yang lebih baik.
- **Analisis Program/Kegiatan Penunjang**
Program/Kegiatan yang mendukung indikator target jumlah Kecamatan dengan kategori baik, sebagai berikut :
 Program : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan
 Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan



Sub Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan anggarannya Rp. 399.076.300 dan realisasi Rp. 381.192.812 (95,52%).

3.2.8. Sasaran Meningkatnya kinerja PDAM Tirta Bulian.

1. Tingkat Kesehatan PDAM Tirta Bulian

PDAM Tirta Bulian sudah melaksanakan penilaian kinerja mandiri. Evaluasi kinerja didasarkan pada data yang diberikan oleh PDAM pada saat evaluasi kinerja dilakukan. Pengukuran Kesehatan berdasarkan indikator BPPSPAM. Indikator ini merupakan pengukuran tingkat kesehatan PDAM yang ditetapkan dengan ukuran yang dibuat oleh Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), dengan pengelompokan kriteria dan nilai sebagai berikut :

KATEGORI	NILAI
SEHAT	> 2,8
KURANG SEHAT	2,2 ^{s/d} 2,8
SAKIT	< 2,2

- **Realisasi Tahun 2022**

Tingkat kesehatan PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi yang dinilai berdasarkan BPPSPAM untuk Tahun Buku 2021 mendapat nilai 2,84 dengan kategori SEHAT.

- **Analisis Program/Kegiatan Penunjang**

Program/Kegiatan yang mendukung indikator Tingkat kesehatan PDAM Tirta Bulian adalah :

Program : Program Perekonomian dan Pembangunan

Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD dengan anggarannya Rp. 55.016.000,- dan realisasi Rp. 54.989.844,- (99,95%).

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



Tabel 9 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	106,34%	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat	100,00%	Menunjang
				Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terlaksana	99,00%	Menunjang
				Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Persentase peningkatan kesejahteraan rakyat	100,00%	Menunjang
					Persentase peningkatan bina mental spiritual	100,00%	Menunjang
				Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Persentase peningkatan kesejahteraan sosial	98,00%	Menunjang
				Pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Persentase peningkatan kesejahteraan rakyat	100,00%	Menunjang
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Predikat indeks kepuasan masyarakat (ikm)	125,00%	Menunjang
					Tingkat kepatuhan terhadap pelayanan publik	100,00%	Menunjang
Penataan organisasi	Persentase penataan organisasi di bidang pelayanan publik dan tata laksana yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di seluruh skpd	100,00%	Menunjang				
Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Persentase skpd yang telah mendapatkan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana dari bagian organisasi	100,00%	Menunjang				
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah (AKIP)	90,49%	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Temuan hasil pengawasan yang diselesaikan	96,67%	Menunjang
				Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang mendukung kalancaran tugas dan fungsi skpd	95,94%	Menunjang
				Penyediaan gaji dan tunjangan asn	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	100,00%	Menunjang
				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	Jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	100,00%	Menunjang

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase terlindunginya barang milik daerah	95,22%	Menunjang
				Pengamanan barang milik daerah skpd	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah skpd	100,00%	Menunjang
				Administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd	99,36%	Menunjang
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100,00%	Menunjang
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	99,29%	Menunjang
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100,00%	Menunjang
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100,00%	Menunjang
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	100,00%	Menunjang
				Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd	93,83%	Menunjang
				Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	100,00%	Menunjang
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd	96,69%	Menunjang
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100,00%	Menunjang
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100,00%	Menunjang
				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpeliharanya barang milik sekretariat daerah	98,92%	Menunjang
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100,00%	Menunjang
			100,00%	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100,00%	Menunjang

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
		Temuan hasil pengawasan yang diselesaikan		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100,00%	Menunjang
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Tingkat akuntabilitas kinerja	100,00%	Menunjang
				Penataan organisasi	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan percepatan reformasi birokrasi	100,00%	Menunjang
				Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Persentase penataan organisasi di bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di seluruh skpd	100,00%	Menunjang
				Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Persentase skpd yang telah dikelola dengan baik di bidang kelembagaan dan analisis jabatannya	100,00%	Menunjang
				Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Persentase skpd yang telah menyusun laporan kinerja sesuai dengan sistematika yang dikordinasikan oleh bagian organisasi	100,00%	Menunjang
3.	Meningkatnya pelayanan kedinasan Walikota dan Wakil Walikota	Persentase tugas-tugas kedinasan Walikota dan Wakil Walikota diselesaikan tepat waktu	100,00%	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase tugas-tugas kedinasan walikota dan wakil walikota diselesaikan tepat waktu	104,24%	Menunjang
				Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sandang pegawai	100,00%	Menunjang
				Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	100,00%	Menunjang
				Administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd	99,36%	Menunjang
				Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	100,00%	Menunjang
				Fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	Persentase tersedianya kebutuhan rumah tangga kdh/ wkdh	100,00%	Menunjang
				Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	100,00%	Menunjang

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	100,00%	Menunjang
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pelayanan kedinasan wali kota dan wakil wali kota yang terlaksana	100,00%	Menunjang
				Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang terlaksana	100,00%	Menunjang
				Fasilitasi keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	100,00%	Menunjang
				Fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	100,00%	Menunjang
				Pendokumentasian tugas pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	100,00%	Menunjang
4.	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pengoordinasian tugas dan kinerja SKPD	Jumlah paket pengadaan barang/jasa pada SKPD yang dilakukan melalui proses tender disampaikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 4 bulan setelah APBD disahkan	292,00%	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam dalam mendorong perkembangan perekonomian daerah	100,00%	Menunjang
				Pelaksanaan kebijakan perekonomian	Laporan kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian	100,00%	Menunjang
				Pengendalian dan distribusi perekonomian	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	100,00%	Menunjang
				Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	100,00%	Menunjang
		Pemantauan kebijakan sumber daya alam	Laporan kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam	100,00%	Menunjang		
		Jumlah SKPD yang realisasi keuangannya >= 40% pada semester i	275,00%	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, kukm, penanaman modal, tenaga kerja	100,00%	Menunjang
				Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, statistik, persandian	100,00%	Menunjang
				Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum	100,00%	Menunjang

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
					dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan		
				Program perekonomian dan pembangunan	Persentase skpd yang menargetkan realisasi keuangan pada dpa-skpd >=50% pada semester i	108,96%	Menunjang
				Pelaksanaan administrasi pembangunan	Surat edaran walikota tentang pedoman pelaksanaan penganggaran	100,00%	Menunjang
					Jumlah kegiatan monitoring yang dilaksanakan	100,00%	Menunjang
					Jumlah kegiatan evaluasi yang dilaksanakan	100,00%	Menunjang
		Jumlah SKPD yang realisasi fisik kegiatannya >=50% pada semester i	187,48%	Fasilitasi penyusunan program pembangunan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah	100,00%	Menunjang
				Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	100,00%	Menunjang
				Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	100,00%	Menunjang
				Program perekonomian dan pembangunan	Persentase paket pengadaan barang/jasa yang diusulkan opd terlaksana secara akuntabel dan transparan	100,00%	Menunjang
				Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persentase paket pengadaan barang/jasa yang diusulkan opd terlaksana secara akuntabel dan transparan	100,00%	Menunjang
				Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	90,00%	Menunjang
				Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (lpse)	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	90,00%	Menunjang
				Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	100,00%	Menunjang
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase perangkat daerah yang telah melakukan analisis jabatan dan analisa beban kerja	100,00%	Menunjang
				Jumlah SKPD yang nilai ikm-nya kategori sangat	224,60%	Penataan organisasi	Persentase penataan organisasi di bidang kelembagaan dan analisis

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
		baik berdasarkan pengukuran survey kepuasan masyarakat yang dilakukan			jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di seluruh skpd		
				Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Persentase skpd yang telah di monitoring dan di evaluasi kualitas pelayanan publik dan tata laksananya	100,00%	Menunjang
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kecamatan dengan kategori baik	100,00%	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah kecamatan dengan kategori baik	100,00%	Menunjang
					Jumlah kelurahan dengan kategori baik	100,00%	Menunjang
					Jumlah kelurahan dengan kategori cepat berkembang	100,00%	Menunjang
				Administrasi tata pemerintahan	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan	100,00%	Menunjang
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	100,00%	Menunjang
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	200,00%	Menunjang
		Pengelolaan administrasi kewilayahan	Jumlah kelurahan dengan kategori baik	100,00%	Menunjang		
			Jumlah kecamatan dengan kategori baik	100,00%	Menunjang		
			Jumlah kelurahan dengan kategori cepat berkembang	100,00%	Menunjang		
		Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Skpd yang memenuhi ketersediaan data dan dokumen pendukung dalam rangka ekppd	100,00%	Menunjang		
		Jumlah Kelurahan dengan kategori baik	100,00%	Fasilitasi kerjasama daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri	100,00%	Menunjang
					Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama	100,00%	Menunjang
Fasilitasi kerja sama dalam negeri	Jumlah dokumen kerjasama dalam negeri yang di tindaklanjuti			100,00%	Menunjang		
Evaluasi pelaksanaan kerja sama	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama			100,00%	Menunjang		
6.	Meningkatnya perkembangan Kelurahan	Jumlah Kelurahan dengan kategori cepat berkembang	100,00%	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah kecamatan dan kelurahan dengan kategori baik	100,00%	Menunjang
				Administrasi tata pemerintahan	Jumlah kegiatan pengelolaan administrasi kewilayahan	100,00%	Menunjang
				Penataan administrasi pemerintahan	Jumlah rapat kunjungan pemerintahan daerah	100,00%	Menunjang

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
7.	Terpenuhi asas pembentukan hukum yang baik	Persentase rancangan produk hukum daerah yang memenuhi asas pembentukan hukum yang baik	100,00%	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terlaksana dengan baik	100,00%	Menunjang
				Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	66,67%	Menunjang
				Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah asn/masyarakat yang mendapat sosialisasi peraturan perundang-undangan	107,50%	Menunjang
				Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rancangan produk hukum daerah yang memenuhi asas materi muatan peraturan perundang-undangan	100,00%	Menunjang
				Fasilitasi dan koordinasi hukum	Persentase rancangan produk hukum daerah yang telah diharmonisasi	100,00%	Menunjang
				Fasilitasi bantuan hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	200,00%	Menunjang
				Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	210,40%	Menunjang
				Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Persentase produk hukum daerah yang didokumentasikan	100,00%	Menunjang
8.	Meningkatnya kinerja PDAM tirta bulian	Tingkat kesehatan PDAM Tirta Bulian	99,30%	Program perekonomian dan pembangunan	Nilai kinerja keuangan	90,16%	Menunjang
					Nilai kinerja pelayanan	90,00%	Menunjang
					Nilai kinerja operasional	110,16%	Menunjang
					Nilai kinerja sumber daya manusia	91,49%	Menunjang
				Pelaksanaan kebijakan perekonomian	Laporan kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian	112,00%	Menunjang
				Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan bumd dan blud	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan bumd dan blud	100,00%	Menunjang

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan DPA Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 memperoleh anggaran sebesar Rp.35.334.289.265,00 dengan realisasi anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 34.136.848.851,00 atau 96,61%.

Tabel 10 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp11.995.761.344,00	Rp11.508.115.278,00	95,93%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp12.458.000,00	Rp12.220.200,00	98,09%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp368.000.000,00	Rp350.395.137,00	95,22%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp99.970.500,00	Rp85.712.600,00	85,74%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp33.894.000,00	Rp33.788.600,00	99,69%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp70.060.900,00	Rp69.560.500,00	99,29%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp54.775.900,00	Rp54.775.900,00	100,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp33.549.800,00	Rp33.537.300,00	99,96%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp2.076.644.900,00	Rp2.063.394.215,00	99,36%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp1.844.296.000,00	Rp1.842.421.268,00	99,90%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp193.428.000,00	Rp181.499.500,00	93,83%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp1.145.702.200,00	Rp1.092.278.516,00	95,34%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.832.664.000,00	Rp1.787.362.540,00	97,53%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp1.097.560.000,00	Rp1.093.532.400,00	99,63%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp301.184.800,00	Rp291.473.300,00	96,78%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp105.652.000,00	Rp103.124.040,00	97,61%
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp480.000.000,00	Rp480.000.000,00	100,00%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp180.000.000,00	Rp180.000.000,00	100,00%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Penataan Organisasi			
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp54.820.000,00	Rp54.730.000,00	99,84%
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp37.101.500,00	Rp37.101.500,00	100,00%
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp491.840.800,00	Rp490.890.877,00	99,81%
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp52.420.000,00	Rp52.290.000,00	99,75%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp6.060.000,00	Rp6.010.000,00	99,17%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
	Fasilitasi Keprotokolan	Rp282.212.000,00	Rp280.720.274,00	99,47%
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp124.671.300,00	Rp123.469.030,00	99,04%
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp226.119.400,00	Rp189.423.338,00	83,77%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
	Administrasi Tata Pemerintahan			
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp242.401.700,00	Rp236.114.687,00	97,41%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Pengelolaan Administrasi Wilayah	Rp399.076.300,00	Rp381.192.812,00	95,52%
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp136.844.200,00	Rp135.856.746,00	99,28%
	Fasilitasi Kerjasama Daerah			
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp228.413.600,00	Rp216.560.714,00	94,81%
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Rp9.831.100,00	Rp8.811.700,00	89,63%
	"PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	"		
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp7.527.726.800,00	Rp7.229.475.439,00	96,04%
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rp144.299.200,00	Rp144.299.200,00	100,00%
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp300.742.700,00	Rp284.994.600,00	94,76%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp115.334.200,00	Rp113.693.000,00	98,58%
	"PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp383.320.200,00	Rp376.619.010,00	98,25%
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp210.824.100,00	Rp210.745.020,00	99,96%
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp88.543.500,00	Rp88.520.890,00	99,97%
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp55.016.000,00	Rp55.489.444,00	100,86%
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp705.510.700,00	Rp692.982.460,00	98,22%
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Rp101.849.900,00	Rp93.046.500,00	91,36%
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rp6.300.800,00	Rp6.169.200,00	97,91%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp6.918.800,00	Rp6.824.820,00	98,64%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp182.598.700,00	Rp182.166.500,00	99,76%
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp105.626.300,00	Rp76.301.015,00	72,24%
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp297.178.696,00	Rp233.390.134,00	78,54%
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp130.616.625,00	Rp113.353.337,00	86,78%
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp344.935.600,00	Rp343.935.950,00	99,71%
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rp387.238.600,00	Rp386.446.840,00	99,80%
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp22.293.600,00	Rp22.032.520,00	98,83%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022



3.3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 11 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	86,75%	92,25%	106,34%	Rp8.009.870.200,00	Rp7.695.870.739,00	96,08%	10,26%
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah (AKIP)	82%	74,20%	90,49%	Rp552.720.800,00	Rp551.630.877,00	99,80%	-9,31%
		Temuan hasil pengawasan yang diselesaikan	100%	100%	100,00%	Rp380.458.000,00	Rp362.615.337,00	95,31%	4,69%
3.	Meningkatnya pelayanan kedinasan Walikota dan Wakil Walikota	Persentase tugas-tugas kedinasan Walikota dan Wakil Walikota diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100,00%	Rp22.178.147.044,00	Rp21.494.188.599,00	96,92%	3,08%
4.	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pengoordinasian tugas dan kinerja SKPD	Jumlah paket pengadaan barang/jasa pada SKPD yang dilakukan melalui proses tender disampaikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 4 bulan setelah APBD disahkan	100%	100%	100,00%	Rp754.467.800,00	Rp752.415.310,00	99,73%	0,27%
		Jumlah SKPD yang realisasi keuangannya >= 40% pada semester i	25%	68,75%	275,00%	Rp266.710.810,50	Rp211.522.243,00	79,31%	195,69%
		Jumlah SKPD yang realisasi fisik kegiatannya >=50% pada semester i	25%	46,87%	187,48%	Rp266.710.810,50	Rp211.522.243,00	79,31%	108,17%
		Jumlah SKPD yang nilai ikm-nya kategori sangat baik berdasarkan pengukuran survey kepuasan masyarakat yang dilakukan	30,61%	68,75%	224,60%	Rp52.420.000,00	Rp52.290.000,00	99,75%	124,85%
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kecamatan dengan kategori baik	20%	20%	100,00%	Rp338.855.633,33	Rp326.178.886,33	96,26%	3,74%
		Jumlah Kelurahan dengan kategori baik	20%	20%	100,00%	Rp338.855.633,33	Rp326.178.886,33	96,26%	3,74%
6.	Meningkatnya perkembangan Kelurahan	Jumlah Kelurahan dengan kategori cepat berkembang	71,43%	71,43%	100,00%	Rp338.855.633,33	Rp326.178.886,33	96,26%	3,74%
7.	Terpenuhi asas pembentukan hukum yang baik	Persentase rancangan produk hukum daerah yang memenuhi asas pembentukan hukum yang baik	100%	100%	100,00%	Rp798.022.000,00	Rp789.577.920,00	98,94%	1,06%
8.	Meningkatnya kinerja PDAM tirta bulian	Tingkat kesehatan PDAM Tirta Bulian	2,86%	2,84%	99,30%	Rp1.058.194.900,00	Rp1.036.678.924,00	97,97%	1,33%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022



Tabel 12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Temuan hasil pengawasan yang diselesaikan	100 persen	96,67 persen	96,67%				
		Persentase tugas-tugas kedinasan walikota dan wakil walikota diselesaikan tepat waktu	95 Persen	99,03 Persen	104,24 %				
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd	100 persen	95,94 persen	95,94%				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	107 Orang	107 Orang	100,00 %	Rp11.995.761.344,00	Rp11.508.115.278,00	95,93%	4,07%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	12 Laporan	12 Laporan	100,00 %	Rp12.458.000,00	Rp12.220.200,00	98,09%	1,91%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlindunginya barang milik daerah	100 Persen	95,22 Persen	95,22%				
	Pengamanan barang milik daerah skpd	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah skpd	8 dokumen	8 dokumen	100,00 %	Rp368.000.000,00	Rp350.395.137,00	95,22%	4,78%
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sandang pegawai	100 angka	100 angka	100,00 %				
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	1 paket	100,00 %	Rp99.970.500,00	Rp85.712.600,00	85,74%	14,26%
	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd	100 persen	99,36 persen	99,36%				
		Persentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd	100 Persen	99,88 Persen	99,88%				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	100,00 %	Rp33.894.000,00	Rp33.788.600,00	99,69%	0,31%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	99,29 Persen	99,29%	Rp70.060.900,00	Rp69.560.500,00	99,29%	0,00%
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	100,00 %	Rp54.775.900,00	Rp54.775.900,00	100,00 %	0,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	4 Paket	100,00 %	Rp33.549.800,00	Rp33.537.300,00	99,96%	0,04%
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	100,00 %	Rp2.076.644.900,00	Rp2.063.394.215,00	99,36%	0,64%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	200 Laporan	200 Laporan	100,00 %	Rp1.844.296.000,00	Rp1.842.421.268,00	99,90%	0,10%
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd	100 persen	93,83 persen	93,83%				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	100 Unit	100 Unit	100,00 %	Rp193.428.000,00	Rp181.499.500,00	93,83%	6,17%
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd	100 persen	96,69 persen	96,69%				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber	12 Laporan	12 Laporan	100,00 %	Rp1.145.702.200,00	Rp1.092.278.516,00	95,34%	4,66%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
		daya air dan listrik yang disediakan							
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	100,00 %	Rp1.832.664.000,00	Rp1.787.362.540,00	97,53%	2,47%
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpeliharanya barang milik sekretariat daerah	100 persen	98,92 persen	98,92%				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	30 Unit	30 Unit	100,00 %	Rp1.097.560.000,00	Rp1.093.532.400,00	99,63%	0,37%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	200 Unit	200 Unit	100,00 %	Rp301.184.800,00	Rp291.473.300,00	96,78%	3,22%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	100,00 %	Rp105.652.000,00	Rp103.124.040,00	97,61%	2,39%
	Fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	Persentase tersedianya kebutuhan rumah tangga kdh/ wkdh	100 persen	100 persen	100,00 %				
	Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	12 paket	12 paket	100,00 %	Rp480.000.000,00	Rp480.000.000,00	100,00 %	0,00%
	Penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	12 paket	12 paket	100,00 %	Rp180.000.000,00	Rp180.000.000,00	100,00 %	0,00%
	Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Predikat indeks kepuasan masyarakat (ikm)	Predikat baik	Predikat Sangat Baik	125,00 %				
		Tingkat kepatuhan terhadap pelayanan publik	Nilai Zona Hijau	Nilai Zona Hijau	100,00 %				
		Tingkat akuntabilitas kinerja	Nilai BB	Nilai B	#VALU E!				
		Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan percepatan reformasi birokrasi	100 Persen	100 Persen	100,00 %				
		Persentase perangkat daerah yang telah melakukan analisis jabatan dan analisa beban kerja	100 Persen	100 Persen	100,00 %				
		Tingkat kematangan perangkat daerah	Predikat Tinggi	Predikat Tinggi	#VALU E!				
	Penataan organisasi	"Persentase penataan organisasi di bidang pelayanan publik dan tata laksana yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di seluruh skpd	100 Persen	100 Persen	100,00 %				
		Persentase penataan organisasi di bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di seluruh skpd	100 Persen	100 Persen	100,00 %				
		Persentase penataan organisasi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di seluruh skpd	100 Persen	100 Persen	100,00 %				
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase skpd yang telah dikelola dengan baik di bidang kelembagaan dan analisis jabatannya	100 Persen	100 Persen	100,00 %	Rp54.820.000,00	Rp54.730.000,00	99,84%	0,16%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase skpd yang telah mendapatkan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana dari bagian organisasi	100 Persen	100 Persen	100,00 %	Rp37.101.500,00	Rp37.101.500,00	100,00 %	0,00%
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase skpd yang kinerjanya telah terevaluasi dan telah melaksanakan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi	100 Persen	100 Persen	100,00 %	Rp491.840.800,00	Rp490.890.877,00	99,81%	0,19%
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase skpd yang telah di monitoring dan di evaluasi kualitas pelayanan publik dan tata laksananya	100 Persen	100 Persen	100,00 %	Rp52.420.000,00	Rp52.290.000,00	99,75%	0,25%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase skpd yang telah menyusun laporan kinerja sesuai dengan sistematika yang dikordinasikan oleh bagian organisasi	100 Persen	100 Persen	100,00 %	Rp6.060.000,00	Rp6.010.000,00	99,17%	0,83%
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pelayanan kedinasan wali kota dan wakil wali kota yang terlaksana	100 persen	100 persen	100,00 %				
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang terlaksana	100 Persen	100 Persen	100,00 %				
	Fasilitasi keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	100 laporan	100 laporan	100,00 %	Rp282.212.000,00	Rp280.720.274,00	99,47%	0,53%
	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	75 laporan	75 laporan	100,00 %	Rp124.671.300,00	Rp123.469.030,00	99,04%	0,96%
	Pendokumentasian tugas pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	100 laporan	100 laporan	100,00 %	Rp226.119.400,00	Rp189.423.338,00	83,77%	16,23%
	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah kecamatan dengan kategori baik	20 persen	20 persen	100,00 %				
		Jumlah kelurahan dengan kategori baik	20 Persen	20 Persen	100,00 %				
		Jumlah kelurahan dengan kategori cepat berkembang	71,43 Persen	71,43 Persen	100,00 %				
		Jumlah kecamatan dan kelurahan dengan kategori baik	100 Persen	100 Persen	100,00 %				
	Administrasi tata pemerintahan	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan	16 dokumen	16 dokumen	100,00 %				
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	75 Dokumen	75 Dokumen	100,00 %				
		Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	50 Dokumen	100 Dokumen	200,00 %				
		Jumlah kegiatan pengelolaan administrasi kewilayahan	100 Persen	100 Persen	100,00 %				
	Penataan administrasi pemerintahan	Jumlah rapat kunjungan pemerintahan daerah	10 angka	10 angka	100,00 %	Rp242.401.700,00	Rp236.114.687,00	97,41%	2,59%
	Pengelolaan administrasi kewilayahan	Jumlah kelurahan dengan kategori baik	20 persen	20 persen	100,00 %	Rp399.076.300,00	Rp381.192.812,00	95,52%	4,48%
		Jumlah kecamatan dengan kategori baik	20 Persen	20 Persen	100,00 %				
		Jumlah kelurahan dengan kategori cepat berkembang	71,43 Persen	71,43 Persen	100,00 %				
	Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Skpd yang memenuhi ketersediaan data dan dokumen pendukung dalam rangka ekppd	100 persen	100 persen	100,00 %	Rp136.844.200,00	Rp135.856.746,00	99,28%	0,72%
	Fasilitasi kerjasama daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri	50 dokumen	50 dokumen	100,00 %				
		Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama	50 Laporan	50 Laporan	100,00 %				
	Fasilitasi kerja sama dalam negeri	Jumlah dokumen kerjasama dalam	10 dokumen	10 dokumen	100,00 %	Rp228.413.600,00	Rp216.560.714,00	94,81%	5,19%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
		negeri yang di tindaklanjuti							
	Evaluasi pelaksanaan kerja sama	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama	1 laporan	1 laporan	100,00 %	Rp9.831.100,00	Rp8.811.700,00	89,63%	10,37%
	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat	100 persen	100 persen	100,00 %				
	Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terlaksana	100 persen	99 persen	99,00%				
	Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Persentase peningkatan kesejahteraan rakyat	100 persen	100 persen	100,00 %	Rp7.527.726.800,00	Rp7.229.475.439,00	96,04%	3,96%
		Persentase peningkatan bina mental spiritual	100 Persen	100 Persen	100,00 %				
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan kesejahteraan sosial	100 Persen	98 Persen	98,00%	Rp144.299.200,00	Rp144.299.200,00	100,00 %	-2,00%
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase peningkatan kesejahteraan rakyat Masyarakat	100 Persen	100 Persen	100,00 %	Rp300.742.700,00	Rp284.994.600,00	94,76%	5,24%
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terlaksana dengan baik	100 persen	100 persen	100,00 %				
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	3 kegiatan	2 kegiatan	66,67%				
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah asn/masyarakat yang mendapat sosialisasi peraturan perundang-undangan	80 orang	86 orang	107,50 %	Rp115.334.200,00	Rp113.693.000,00	98,58%	8,92%
	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rancangan produk hukum daerah yang memenuhi asas materi muatan peraturan perundang-undangan	100 persen	100 persen	100,00 %				
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase rancangan produk hukum daerah yang telah diharmonisasi	100 Persen	100 Persen	100,00 %				
	Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	250 dokumen	526 dokumen	210,40 %	Rp383.320.200,00	Rp376.619.010,00	98,25%	112,15 %
	Fasilitasi bantuan hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	1 kasus	2 kasus	200,00 %	Rp210.824.100,00	Rp210.745.020,00	99,96%	100,04 %
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase produk hukum daerah yang didokumentasikan	100 Persen	100 Persen	100,00 %	Rp88.543.500,00	Rp88.520.890,00	99,97%	0,03%
	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam dalam mendorong perkembangan perekonomian daerah	100 persen	100 persen	100,00 %				
		Nilai kinerja keuangan	Nilai 0,61	Nilai 0,55	90,16%				
		Nilai kinerja pelayanan	Nilai 0,5	Nilai 0,45	90,00%				
		Nilai kinerja operasional	Nilai 1,28	Nilai 1,41	110,16 %				
		Nilai kinerja sumber daya manusia	Nilai 0,47	0,43	91,49%				
	Pelaksanaan kebijakan perekonomian	Laporan kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian	25 laporan	28 laporan	112,00 %				
		Laporan kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian	24 Dokumen	24 Dokumen	100,00 %				

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan bumd dan blud	24 Dokumen	24 Dokumen	100,00 %	Rp55.016.000,00	Rp55.016.000,00	100%	0,00%
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	25 Laporan	25 Laporan	100,00 %	Rp705.510.700,00	Rp692.982.460,00	98,22%	1,78%
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00 %	Rp101.849.900,00	Rp93.046.500,00	91,36%	8,64%
	Pemantauan kebijakan sumber daya alam	Laporan kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam	16 dokumen	16 dokumen	100,00 %				
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, kukm, penanaman modal, tenaga kerja	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %	Rp6.300.800,00	Rp6.169.200,00	97,91%	2,09%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, statistik, persandian	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %	Rp6.918.800,00	Rp6.824.820,00	98,64%	1,36%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanian	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00 %	Rp182.598.700,00	Rp182.166.500,00	99,76%	0,24%
	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase skpd yang menargetkan realisasi keuangan pada dpa-skpd >=50% pada semester i	80 persen	87,17 persen	108,96 %				
	Pelaksanaan administrasi pembangunan	Surat edaran walikota tentang pedoman pelaksanaan penganggaran	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %				
		Jumlah kegiatan monitoring yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00 %				
		Jumlah kegiatan evaluasi yang dilaksanakan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00 %				
	Fasilitasi penyusunan program pembangunan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah	2 dokumen	2 dokumen	100,00 %	Rp105.626.300,00	Rp76.301.015,00	72,24%	27,76%
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	100,00 %	Rp297.178.696,00	Rp233.390.134,00	78,54%	21,46%
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	6 Laporan	6 Laporan	100,00 %	Rp130.616.625,00	Rp113.353.337,00	86,78%	13,22%
	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase paket pengadaan barang/jasa yang diusulkan opd terlaksana secara akuntabel dan transparan	100 persen	100 persen	100,00 %				
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase paket pengadaan barang/jasa yang	100 Persen	100 Persen	100,00 %				

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022**



No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
		diusulkan opd terlaksana secara akuntabel dan transparan							
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	60 Dokumen	54 Dokumen	90,00%	Rp344.935.600,00	Rp343.935.950,00	99,71%	-9,71%
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	60 Dokumen	54 Dokumen	90,00%	Rp387.238.600,00	Rp386.446.840,00	99,80%	-9,80%
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	40 Orang	40 Orang	100,00 %	Rp22.293.600,00	Rp22.032.520,00	98,83%	1,17%



BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip - prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip -prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 ini disusun sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala OPD dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tebing Tinggi,
**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TEBING TINGGI**

2023

**Drs. BAMBANG SUDARYONO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660523 198603 1 004**



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Dr. Sutomo Nomor.14 Tebing Tinggi 20623 Telepon (0621)21272 Fax (0621)21273

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD DIMIYATHI, S.Sos, M. TP

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. H. UMAR ZUNAI DI HASIBUAN, MM

Jabatan : WALI KOTA TEBING TINGGI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Tebing Tinggi,
Pihak Pertama,

2022

Ir. H. UMAR ZUNAI DI HASIBUAN, MM

MUHAMMAD DIMIYATHI, S.Sos, M. TP



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Dr. Sutomo Nomor.14 Tebing Tinggi 20623 Telepon (0621)21272 Fax (0621)21273

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DAERAH KOTA KOTA TEBING TINGGI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	80 (Predikat)
2.	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DAN KINERJA ORGANISASI	NILAI AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)	(Angka)
		TEMUAN HASIL PENGAWASAN YANG DISELESAIKAN	(Persen)
3.	MENINGKATNYA PELAYANAN KEDINASAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA	PERSENTASE TUGAS-TUGAS KEDINASAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	(Persen)
4.	MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PENGOORDINASIAN TUGAS DAN KINERJA SKPD	JUMLAH PAKET PENGADAAN BARANG/JASA PADA SKPD YANG DILAKUKAN MELALUI PROSES TENDER DISAMPAIKAN KEPADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 BULAN SETELAH APBD DISAHKAN	(Persen)
		JUMLAH SKPD YANG REALISASI KEUANGANNYA \geq 40% PADA SEMESTER I	25 (Persen)
		JUMLAH SKPD YANG REALISASI FISIK KEGIATANNYA \geq 50% PADA SEMESTER I	25 (Persen)
		JUMLAH SKPD YANG NILAI IKM-NYA KATEGORI SANGAT BAIK BERDASARKAN PENGUKURAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN	(Angka)
5.	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN KEPEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	JUMLAH KECAMATAN DENGAN KATEGORI BAIK	(Persen)
		JUMLAH KELURAHAN DENGAN KATEGORI BAIK	(Persen)
6.	MENINGKATNYA PERKEMBANGAN KELURAHAN	JUMLAH KELURAHAN DENGAN KATEGORI CEPAT BERKEMBANG	(Persen)
7.	TERPENUHI ASAS PEMBENTUKAN HUKUM YANG BAIK	PERSENTASE RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG MEMENUHI ASAS PEMBENTUKAN HUKUM YANG BAIK	100 (Persen)
8.	MENINGKATNYA KINERJA PDAM TIRTA BULIAN	TINGKAT KESEHATAN PDAM TIRTA BULIAN	3.14 (Angka)

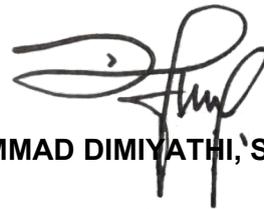
No.	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 21,222,283,800
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 38,451,500
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 542,124,900
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 66,700,000
5.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 9,511,716,400
6.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp. 2,392,714,500
TOTAL		Rp. 33,773,991,100

Pihak Kedua,



Ir. H. UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN, MM

Pihak Pertama,



MUHAMMAD DIMIYATHI, S.Sos, M. TP



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Dr. Sutomo Nomor.14 Tebing Tinggi 20623 Telepon (0621)21272 Fax (0621)21273

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Bambang Sudaryono

Jabatan : PLT. SEKRETARIS DAERAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Muhammad Dimiyathi, S.Sos, M.TP

Jabatan : PJ. WALI KOTA TEBING TINGGI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Muhammad Dimiyathi, S.Sos, M.TP

Tebing Tinggi,

2022

Pihak Pertama,


Drs. Bambang Sudaryono

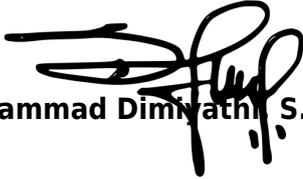
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
KOTA TEBING TINGGI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	86,75 (Indeks)
2.	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DAN KINERJA ORGANISASI	NILAI AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)	82 (Angka)
		TEMUAN HASIL PENGAWASAN YANG DISELESAIKAN	100 (Persen)
3.	MENINGKATNYA PELAYANAN KEDINASAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA	PERSENTASE TUGAS-TUGAS KEDINASAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	100 (Persen)
4.	MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PENGOORDINASIAN TUGAS DAN KINERJA SKPD	PERSENTASE PAKET PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIUSULKAN OPD TERLAKSANA SECARA AKUNTABEL DAN TRANSPARAN	100 (Persen)
		JUMLAH SKPD YANG REALISASI KEUANGANNYA \geq 40% PADA SEMESTER I	25 (Persen)
		JUMLAH SKPD YANG REALISASI FISIK KEGIATANNYA \geq 50% PADA SEMESTER I	25 (Persen)
		JUMLAH SKPD YANG NILAI IKM-NYA KATEGORI SANGAT BAIK BERDASARKAN PENGUKURAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN	30,61 (Persen)
5.	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN KEPEREMINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	JUMLAH KECAMATAN DENGAN KATEGORI BAIK	20 (Persen)
		JUMLAH KELURAHAN DENGAN KATEGORI BAIK	20 (Persen)
6.	MENINGKATNYA PERKEMBANGAN KELURAHAN	JUMLAH KELURAHAN DENGAN KATEGORI CEPAT BERKEMBANG	71,43% (Persen)
7.	TERPENUHI ASAS PEMBENTUKAN HUKUM YANG BAIK	PERSENTASE RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG MEMENUHI ASAS PEMBENTUKAN HUKUM YANG BAIK	100 (Persen)
8.	MENINGKATNYA KINERJA PDAM TIRTA BULIAN	TINGKAT KESEHATAN PDAM TIRTA BULIAN	2,86 (Angka)

No.	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 22,945,831,800
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 37,101,500
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 552,720,800
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 52,420,000
5.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 9,672,022,700
6.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp. 2,346,084,321
TOTAL		Rp. 35,606,181,121

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Muhammad Dimiyathi, S.Sos, M.TP


Drs. Bambang Sudaryono